

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

- a. Letak Geografis Kabupaten Tuban

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tuban



Sumber: www.slideshare.net/athiyarachma

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Tuban terletak di jalur pantai utara pulau Jawa yakni pada koordinat $111^{\circ} 30' - 112^{\circ} 35' \text{ BT}$ dan $6^{\circ} 40' - 7^{\circ} 14' \text{ LS}$. Luas wilayah Kabupaten mencapai $1.839,94 \text{ km}^2$ dan wilayah laut yang mencapai 22.608 km^2 .

Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.¹

- b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kabupaten Tuban sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban pada sensus penduduk terakhir pada tahun 2020 mencapai

¹ Tubankab, 'Profil Tuban', *Tubankab.Go.Id*, 2022 <<https://tubankab.go.id/page/profil-tuban>> [accessed 13 April 2023].

1.298.302 Jiwa yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten Tuban. Data persebaran populasi di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Persebaran Populasi Penduduk Kabupaten Tuban

| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Bancar | 30.904 | 30.988 |
| 2 | Bangilan | 26.473 | 26.195 |
| 3 | Grabagan | 21.302 | 21.032 |
| 4 | Jatirogo | 30.298 | 29.842 |
| 5 | Jenu | 29.551 | 29.173 |
| 6 | kenduruan | 15.566 | 15.291 |
| 7 | Kerek | 37.366 | 37.962 |
| 8 | Merakurak | 31.074 | 31.108 |
| 9 | Montong | 29.263 | 28.293 |
| 10 | Palang | 46.781 | 46.415 |
| 11 | Parengan | 30.046 | 29.867 |
| 12 | Plumpang | 43.087 | 42.724 |
| 13 | Rengel | 32.203 | 31.903 |
| 14 | Semanding | 59.791 | 60.695 |
| 15 | Senori | 23.016 | 22.743 |
| 16 | Singgahan | 22.968 | 22.528 |
| 17 | Soko | 45.820 | 44.848 |

Sumber: BPS Tuban (Data Diolah)²

c. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dari tahun sebelumnya. Angka persentase penurunan kemiskinan yakni dari 16,31 persen pada tahun 2021 menjadi 15,02 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban telah efektif dilaksanakan.³

Tingkat kemiskinan di kabupaten Tuban sejak tahun 2011 – 2022 cenderung mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase. Meskipun demikian, pada tahun

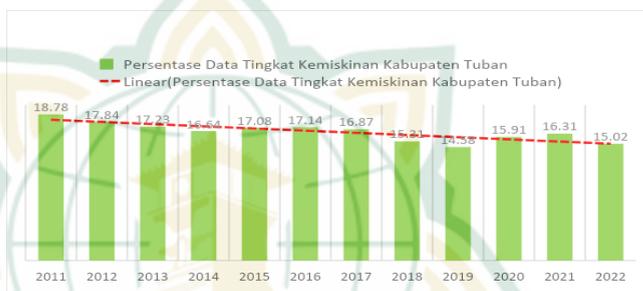
² Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, “Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tuban, 2019,” tubankab.bps.go.id, 2020, <https://tubankab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.

³ BPS Tuban, “Profil Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2022,” no. 04 (2022): 7.

2020 – 2021 tingkat kemiskinan kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga mobilitas masyarakat terbatas.⁴

Data penurunan tingkat kemiskinan kabupaten Tuban dari 2011 – 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2011 - 2022



Sumber: Berita Resmi Statistik (Data Diolah)⁵

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga faktor yakni kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), Pendidikan, serta pendapatan (hidup layak). Adanya IPM ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.

IPM di kabupaten Tuban pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Data BPS kabupaten Tuban mengungkapkan adanya peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Tuban sebesar 0,75 poin atau sebesar 1,10 persen. Pada tahun 2021, IPM kabupaten Tuban mencapai 68,91 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang mencapai 69,67 poin.⁶

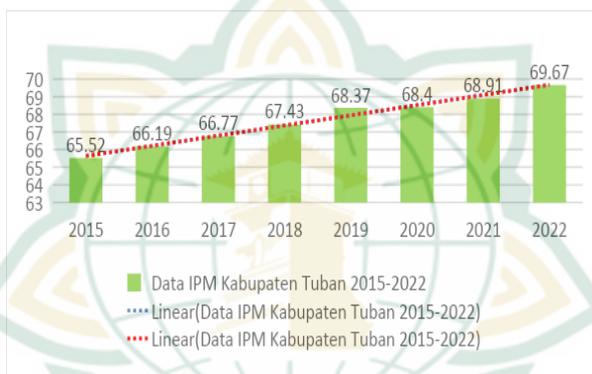
⁴ BPS Tuban, “Profil Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2022.”

⁵ BPS Tuban, “Profil Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2022.”

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2022,” no. 02 (2022): 1–10, <https://pacitankab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>.

Peningkatan pada poin IPM mengindikasikan bahwa perkembangan pembangunan jangka panjang mengalami kemajuan. Pengukuran IPM dilakukan pada tiga komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran. Sehingga, adanya peningkatan pada poin IPM kabupaten Tuban mencerminkan bahwa adanya perbaikan pada pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran di sektor sumber daya manusia.

Gambar 4. 3 Data Index Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2015 -2022



Sumber: Berita Resmi Statistik – IPM 2015-2022 (Data Diolah)⁷

e. PKH di Kabupaten Tuban

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan PKH sejak tahun 2007, karena tidak semua kabupaten terpilih pada awal dilaksanakannya PKH di Indonesia. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, seperti data di bawah ini:

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2022.”

Gambar 4. 4 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2022



Sumber: Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2022 (Data diolah)

Sementara pada tahun 2023, jumlah KPM di kabupaten Tuban mengalami penurunan sebanyak 40.907 KPM yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Tuban. Penentuan sasaran penerima bantuan diambil dari data keluarga miskin dan rentan yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Khusus di Kabupaten Tuban, setelah penentuan sasaran diambil dari DTKS, pemerintah kabupaten melakukan verval (verifikasi dan validasi) kelayakan menggunakan portal Tuban satu data. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memfilter data agar sasaran yang ada di DTKS benar-benar layak sebagai penerima manfaat bantuan.

Pendamping merupakan pelaksana pendampingan PKH di lingkup kecamatan. Pada tahun 2023, Jumlah pendamping di kabupaten Tuban mencapai 151 pendamping yang tersebar ke berbagai wilayah di kabupaten Tuban. Data jumlah pendamping per kecamatan di kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Data Rekapitulasi Persebaran Pendamping di Kabupaten Tuban Tahun 2023

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Pendamping | Jumlah Kelompok | Jumlah KPM |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Bancar | 9 | 117 | 2651 |
| 2 | Bangilan | 7 | 72 | 1818 |
| 3 | Grabagan | 6 | 61 | 1649 |
| 4 | Jatirogo | 5 | 62 | 1337 |
| 5 | Jenu | 7 | 74 | 1886 |
| 6 | Kenduruan | 4 | 51 | 1034 |
| 7 | Kerek | 6 | 91 | 1895 |
| 8 | Merakurak | 8 | 92 | 2373 |
| 9 | Montong | 4 | 61 | 1604 |
| 10 | Palang | 12 | 131 | 2958 |
| 11 | Parengan | 6 | 72 | 1908 |
| 12 | Plumpang | 13 | 136 | 3485 |
| 13 | Rengel | 9 | 120 | 2710 |
| 14 | Semanding | 10 | 113 | 2879 |
| 15 | Senori | 7 | 80 | 2165 |
| 16 | Singgahan | 7 | 74 | 2053 |
| 17 | Soko | 14 | 146 | 3901 |
| 18 | Tambakboyo | 4 | 56 | 1481 |
| 19 | Tuban | 5 | 60 | 1566 |
| 20 | Widang | 8 | 76 | 1865 |
| Jumlah | | 151 | 1,745 | 43,218 |

Sumber: Rekap Data Pendamping 2023

Terdapat beberapa kebijakan terkait penetapan lokasi dampingan pendamping PKH. Kebijakan penempatan wilayah dampingan pendamping PKH di kabupaten Tuban telah beberapa kali mengalami pergantian. Pada tahun 2023, Lokasi dampingan telah dilakukan satu kali pergantian wilayah dampingan berdasarkan domisili pendamping sesuai kebijakan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Hal ini dilakukan agar mempermudah pendamping untuk menjangkau wilayah damping, sehingga mampu meningkatkan kinerja pendamping.

Namun pada tahun sebelumnya, pergantian wilayah dampingan di kabupaten Tuban dilakukan minimal sekali

dalam setahun. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) *Reward*, kebijakan ini diberikan ketika kinerja pendamping yang baik. Jika sebelumnya pendamping mendapat wilayah dampingan yang jauh dari domisili, maka dipindahkan yang dekat dengan domisili pendamping.
- 2) *Punishment*, kebijakan ini diberikan ketika kinerja pendamping yang kurang maksimal. Sehingga mendapatkan *punishment* berupa wilayah dampingan yang jauh dari domisili agar ada efek jera dan memaksimalkan kerjanya
- 3) Penyebaran, kebijakan ini diberikan agar pendamping tidak mengalami kejenuhan dalam melaksanakan tugasnya yang sudah dilaksanakan di daerah yang sama selama beberapa tahun sebelumnya.

f. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi, penelitian ini menggunakan sample beberapa wilayah saja untuk dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada tiga kecamatan yakni Bancar, Jatirogo, dan Senori. Pemilihan lokasi penelitian diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni:

- 1) Kecamatan Bancar merupakan kecamatan dengan angka graduasi yang tinggi. Disamping itu, masyarakat di kecamatan Bancar memiliki keanekaragaman mata pencaharian meliputi pertanian, perdagangan, serta perikanan (nelayan).
- 2) PKH Kecamatan Jatirogo memperoleh penghargaan dari Bupati Tuban yakni Jumlah graduasi terbanyak pada tahun 2018
- 3) Kecamatan Senori memiliki angka tingkat graduasi yang rendah, namun pertemuan kelompok di Senori sering dilakukan oleh pendamping.

Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan P2K2 di ketiga lokasi tersebut. Di samping itu, pertimbangan lainnya yaitu dapat mengetahui dampak pelaksanaan P2K2 di lokasi yang berbeda apakah mampu meningkatkan angka graduasi KPM PKH atau ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut.

2. Implementasi P2K2

a. Pelaksanaan P2K2

1) Mulai Pelaksanaan

P2K2 dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada KPM PKH dengan tujuan untuk merubah perilaku KPM menjadi lebih mandiri. Upaya pemberian edukasi ini dilakukan oleh Pendamping PKH yang tersebar di setiap desa dampingan. Sebelum diadakan kegiatan P2K2, Pendamping PKH mendapat pembekalan berupa pembinaan serta penguatan materi P2K2 dan bagaimana melaksanakan *coaching* yang baik kepada KPM PKH. Hal ini dilakukan agar pendamping siap saat terjun ke lapangan dan mampu memberikan pengajaran yang baik.

Awal pelaksanaan P2K2 di Kabupaten Tuban sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa P2K2 dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda. Perbedaan pelaksanaan P2K2 disebabkan oleh Pemanggilan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) pendamping PKH dalam pembekalan P2K2 oleh Balai Besar Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial RI yang tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan secara bertahap.

Catatan hasil wawancara menunjukkan perbedaan waktu pembekalan P2K2 kepada pendamping di tiga lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data Awal Pelaksanaan Pembekalan P2K2 Pendamping PKH di Bancr, Jatirogo dan Senori

| No | Kecamatan | Mulai Pelaksanaan |
|----|-----------|-------------------|
| 1 | Bancar | 2017 |
| 2 | Jatirogo | 2018 |
| 3 | Senori | 2020 |

Sumber: Catatan hasil wawancara (Data diolah)

Sesuai pemaparan dari Informan 1 (CWP_1) yang mengatakan bahwa pelaksanaan P2K2 di daerahnya dimulai pada 2017.

*“Pelaksanaan P2K2 disini ada mulai tahun 2017, ya setelah pendamping mendapat pelatihan P2K2 dari pusat langsung dipraktekkan disini.”
(CWP_1)*

Sementara hasil wawancara dari Informan 8 (CWKC_2) mengungkapkan bahwa pembekalan P2K2 kepada tiap pendamping berbeda yakni dilaksanakan pada tahun 2018, 2019, serta 2020.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan dimulainya pelaksanaan P2K2 di setiap desa binaan memiliki perbedaan sesuai waktu pembekalan yang diperoleh oleh pendamping PKH.

2) Pelaksanaan P2K2

Dalam pelaksanaan P2K2,

a) Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan sebelum dilaksanakannya pembelajaran P2K2. Pada tahap ini, pendamping membuat konsep perencanaan terkait jadwal pelaksanaan, materi pembelajaran, penentuan kelompok, serta pemilihan lokasi.

Hasil wawancara Informan 6 (CWKC_1) menunjukkan bahwa pendamping menyusun rencana pelaksanaan P2K2 yang dilakukan setiap awal bulan. Pembuatan rencana pelaksanaan P2K2 bertujuan agar memudahkan pendamping dalam menyusun kegiatan bulanan karena tugas pendamping selain melaksanakan P2K2 juga terdapat tugas lainnya. Susunan rencana P2K2 berisi penentuan jadwal P2K2 dalam satu bulan, modul apa saja yang akan disampaikan kepada kelompok-kelompok di wilayah dampingan.

Dalam pembuatan jadwal, menurut Informan 2 (CWP_2) mengemukakan bahwa pelaksanaan P2K2 dijadwalkan di tanggal yang sama dengan alasan agar mempermudah KPM dalam mengingat jadwal P2K2.

Tahap perencanaan selanjutnya adalah pemilihan lokasi diadakannya P2K2. Menurut hasil wawancara Informan 1 (CWP_1) bahwa Lokasi P2K2 ditentukan oleh kesepakatan bersama, hal ini disebabkan oleh jarak antar rumah KPM satu dengan yang lain relatif cukup jauh,

sehingga agar menghindari konflik antar KPM maka pendamping melakukan musyawarah bersama untuk menentukan tempat P2K2 berlangsung. Hasil wawancara Informan 1 (CWP_1) mengungkapkan terkait lokasi pelaksanaan P2K2 yakni

“Kalau lokasinya awalnya di rumah KPM gantian gitu, tapi biar mudah jadi di rumah ketua kelompok pak biar tidak ribet.”

Sedangkan hasil wawancara Informan 2 (CWP_2) mengungkapkan bahwa

“Awalnya pendamping mengumpulkan KPM di Balai Desa bersama dengan Kepala Desa, lalu menyampaikan proses P2K2 itu seperti apa, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok setiap desa dan menyusun jadwal pertemuannya, setiap kelompok memiliki jadwal yang berbeda dimulai tanggal 15-30 setiap bulan.”

Hal ini sesuai dengan Hasil observasi 1 yang menunjukkan bahwa lokasi P2K2 dilaksanakan di Balai Desa setempat, sedangkan hasil observasi 2 menunjukkan bahwa lokasi P2K2 dilaksanakan di rumah salah satu KPM PKH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi untuk pelaksanaan P2K2 tidak hanya satu tempat, namun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

b) Pembelajaran

(1) Metode pelaksanaan

Pembelajaran merupakan proses utama dalam pelaksanaan P2K2. Pada proses pembelajaran ini, pendamping membagi KPM wilayah dampingan ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jarak antar rumah KPM.

Pembagian kelompok pada KPM PKH ini memiliki berbagai macam fungsi, tidak hanya untuk proses pembelajaran P2K2, namun juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pendamping PKH dengan

kelompok dampingan baik terkait verifikasi dan validasi data juga ketika ada pencairan bantuan dari pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara Informan 4 (CWKP_1) yakni

“FDS disampaikan per kelompok, pernah juga dilakukan FDS bersama antar pendamping di satu kecamatan secara bergilir di beberapa desa”

Tahap pertama dalam proses pembelajaran P2K2 adalah pembukaan. Pendamping PKH bertugas sebagai fasilitator yang memimpin proses pembelajaran serta menyampaikan materi P2K2.

Hasil pengamatan menemukan bahwa pada proses pembukaan pembelajaran P2K2, pendamping memulai pembelajaran dengan salam kemudian menanyakan kabar kepada KPM selama satu bulan terakhir.

Setelah dibuka, pendamping mengajak KPM untuk melakukan *ice breaking* dengan cara berdiri dan menghitung angka 1 sampai 10. Hal ini dilakukan agar meningkatkan konsentrasi KPM dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Sesuai hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) yakni:

“Selama proses penyampaian biasanya dikasih materi terus agar tidak ngantuk dikasih ice breaking, terus tanya jawab kepada KPM masalah apa yang terjadi dilanjut tanya sudah paham materinya apa belum gitu.”

Tahap kedua setelah pembukaan adalah *review* materi. Hasil observasi mengungkapkan bahwa pada tahap ini, pendamping menanyakan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hasil observasi ditemukan bahwa terdapat KPM yang mengingat materi, namun ada juga yang lupa. Sebagaimana hasil wawancara Informan 5 (CWKP_2) yaitu

“Pendamping selalu mengingatkan tentang materi P2K2 setiap kali pertemuan”

Untuk membantu mengingat materi sebelumnya, pendamping mengulang sedikit materi sebelumnya yang disampaikan oleh pendamping pada sesi sebelumnya kurang lebih selama 5 – 15 menit, kemudian melakukan sesi tanya jawab terkait materi sebelumnya kurang lebih 15 menit.

Tahap ketiga adalah penyampaian materi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa metode penyampaian materi dalam P2K2 dilaksanakan menggunakan 3 metode yakni

- (a) Metode ceramah, digunakan dalam pelaksanaan penyampaian materi. Pendamping menyampaikan materi yang terbagi menjadi 5 modul yaitu Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, Modul Perlindungan Anak, dan Modul Kesejahteraan Sosial.
- (b) Metode diskusi, pendamping melakukan diskusi dengan KPM tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh KPM sesuai materi yang akan disampaikan.
- (c) Metode tanya jawab, pada metode ini pendamping menanyakan kepada KPM apakah KPM paham materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan agar pendamping bisa mengukur tingkat pemahaman KPM.

Sebagaimana hasil wawancara Informan 2 (CWP_2) yaitu:

“Pola penyampaian selama P2K2 biasanya melalui diskusi dengan KPM menanyakan masalah yang dihadapi, selain itu juga ceramah, serta tanya jawab kepada KPM”.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara Informan 3 (CWP_3) terkait metode dalam penyampaian materi

“Metode yang digunakan dalam pelatihan P2K2 yaitu ceramah bervariasi, diskusi, tanya jawab, simulasi, hearing studi kasus.”

Penggunaan bahasa dalam penyampaian materi menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti. Sesuai hasil observasi yakni Pendamping menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti, serta disampaikan secara humoris agar suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan KPM tidak tegang saat mendengarkan.

Pendamping menyampaikan materi yang membahas modul keuangan, serta stunting. Proses yang dilakukan yakni dari pembukaan, review materi, identifikasi masalah, serta penyampaian isi modul disampaikan secara berurutan sehingga mempermudah KPM dalam memahami materi yang disampaikan. Di sela-sela penyampaian materi, pendamping memberikan sesi tanya jawab di setiap 10 menit. Disamping itu, pendamping juga menggunakan slogan-slogan yang dapat memperkuat materi yang disampaikan, pada saat itu di modul pengelolaan keuangan yang dipakai adalah *“uang tidak cukup?ya di atur dong”*, slogan tersebut memudahkan KPM mempraktikkan materi yang disampaikan.

Disamping penyampaian tugas, pendamping juga memberikan tugas untuk mengisi buku pintar KPM, namun karena KPM tidak memiliki buku pintar pendamping meniasati dengan memberikan lembaran kertas kosong dan alat tulis.

Tahap terakhir adalah penutup, pendamping menutup sesi P2K2 tersebut

serta tetap mengingatkan pada slogan materi yang telah disampaikan pada saat itu. Disamping itu, pendamping juga memberikan motivasi kepada KPM diluar materi yang telah disampaikan terutama terkait kemandirian KPM agar tidak tergantung kepada bantuan.

Dari hasil penelitian terkait metode pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa metode dalam proses penyampaian materi dibagi menjadi beberapa tahap yakni:

- (a) Pembagian Kelompok dampingan;
 - (b) Pembukaan pembelajaran;
 - (c) Review materi sebelumnya;
 - (d) Penyampaian materi;
 - (e) Penutup;
- (2) Media yang digunakan

Media atau alat pembelajaran adalah pendukung utama yang membantu mempermudah kegiatan pembelajaran P2K2. Sehingga tanpa dukungan alat pembelajaran, pelaksanaan P2K2 akan terhambat.

Menurut hasil wawancara dengan Informan 6 (CWKC_1), alat pembelajaran diberikan ketika pendamping PKH memperoleh Diklat P2K2. Namun, pemberian alat pembelajaran setiap pendamping berbeda, ada yang diklat di tahun yang sama namun tidak memperoleh alat pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat peraga pembelajaran yang dimiliki setiap pendamping berbeda-beda.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran P2K2. Informan 1 (CWP_1) mengatakan beberapa media yang digunakan yakni

“Media yang dipakai untuk P2K2 ya seperti flip cart, laptop, modul untuk materi.”

Informan 3 (CWP_3) mengungkapkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu:

“Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah Modul bagi Pendamping, buku Pintar, Brosur, Poster, Flipchart, Film, Alat permainan (kartu, papan permainan). Peralatan Audio Visual pendukung berupa laptop, speaker, TV, DVD Player (jika ada) dan alat tulis

(3) Partisipasi KPM

Partisipasi KPM diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan KPM dalam proses pembelajaran P2K2. Partisipasi di dalam pembelajaran merupakan umpan balik (*feedback*) yang menandakan bahwa pihak yang mendengarkan telah memahami apa yang disampaikan.

Pendamping membangun komunikasi yang baik dengan KPM. Adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pendamping dan KPM menjadikan pembelajaran lebih diterima oleh KPM serta mampu memberikan timbal balik atas apa yang telah disampaikan oleh pendamping.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Partisipasi KPM dalam pelaksanaan P2K2 dinilai bagus karena KPM aktif selama pembelajaran berlangsung. Disamping itu KPM juga merasa senang adanya pembelajaran melalui P2K2.

Dalam pengamatan dan hasil wawancara, partisipasi KPM dalam pembelajaran P2K2 dibagi menjadi 2 yakni:

(a) Verbal

Merupakan partisipasi dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Hasil observasi menunjukkan adanya partisipasi verbal yang dapat dilihat dari

antusias KPM dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendamping, selain itu KPM juga aktif bertanya tentang apa yang tidak dimengerti dan bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi, sehingga komunikasi antara KPM dengan pendamping berjalan lancar.

Hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) menunjukkan bahwa KPM senang mendapat materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

“KPM sangat senang karena mendapatkan ilmu baru, dan ilmu tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.”

(b) Non-verbal

Merupakan bentuk partisipasi yang berupa umpan balik yang dilakukan melalui gerak tubuh seperti mengangguk maupun menggelengkan kepala, isyarat, serta melalui raut wajah.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, KPM senang mendengarkan materi yang disampaikan hal ini terlihat dari raut wajah KPM yang terlihat tersenyum senang dan antusias saat bertanya maupun saat melakukan *ice breaking*.

Hal serupa juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan KPM yang semua menjawab senang dengan adanya pembelajaran P2K2.

Di sisi lain, sesuai hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) mengatakan bahwa KPM ada yang senang dan ada yang tidak senang. Alasan yang mendasari KPM senang adalah karena KPM memperoleh ilmu baru serta suasana yang menyenangkan. Sedangkan untuk tanggapan tidak

senang disebabkan oleh adanya jadwal pelaksanaan P2K2 yang bersamaan dengan KPM harus bekerja, sehingga KPM tidak bisa mengikuti P2K2.

“Tanggapan KPM, ya ada yang senang ada yang gak, senang karena dapat tambahan ilmu juga terhibur saat ice breaking. Yang gak senang biasanya karena kadang pas jadwal P2K2, KPM harus pergi ke sawah, kadang karena hujan juga.”

(4) Unsur yang Terlibat

Unsur yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran P2K2 sesuai hasil data yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut

(a) Pendamping PKH

Hasil wawancara dengan Informan 10 (CWKK_1) yakni Pendamping memiliki tugas penting dalam kegiatan P2K2 karena pendamping merupakan fasilitator yang memiliki tugas memimpin berjalannya proses pembelajaran, menyampaikan materi modul P2K2, serta membuat laporan hasil kegiatan P2K2 kepada koordinator kabupaten.

Jumlah keseluruhan pendamping di kabupaten Tuban menurut data pendamping per Juli 2023 mencapai 151 pendamping yang tersebar ke berbagai wilayah kecamatan di kabupaten Tuban. Sedangkan jumlah pendamping sesuai wilayah kecamatan objek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Data Pendamping Kecamatan Bancar, Jatirogo dan Senori per Juli 2023

| No | Kecamatan | Jumlah Pendamping |
|--------|-----------|-------------------|
| 1 | Bancar | 9 |
| 2 | Jatirogo | 5 |
| 3 | Senori | 7 |
| Jumlah | | 21 |

Sumber: Rekalipulasi data pendamping PKH Kab. Tuban (Data diolah)

(b) KPM

Keluarga penerima manfaat atau sering disebut dengan KPM adalah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Tujuan adanya P2K2 dalam PKH adalah untuk merubah pola pikir serta perilaku KPM agar menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan yang ada.

Dalam pelaksanaan P2K2, setiap wilayah dampingan dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi maksimal 40 KPM.

Berikut adalah hasil data pembagian kelompok yang diperoleh selama penelitian:

Tabel 4. 5 Data pembagian kelompok kecamatan Bancar tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah Kelompok | Jumlah KPM |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendamping 1 | 14 | 307 |
| 2 | Pendamping 2 | 11 | 304 |
| 3 | Pendamping 3 | 11 | 319 |
| 4 | Pendamping 4 | 12 | 279 |
| 5 | Pendamping 5 | 12 | 286 |
| 6 | Pendamping 6 | 14 | 294 |
| 7 | Pendamping 7 | 21 | 302 |
| 8 | Pendamping 8 | 12 | 282 |
| 9 | Pendamping 9 | 10 | 278 |
| Jumlah | | 117 | 2651 |

Sumber: Data pembagian kelompok kecamatan bancar (Data diolah)

Data pembagian kelompok di kecamatan Bancar pada tahun 2023 terdiri dari 117 kelompok yang tersebar di setiap wilayah dampingan. Pada pendamping 1, jumlah kelompok yang ada berjumlah 14 kelompok yang berisi 307 KPM. Jika jumlah KPM yang ada di wilayah dampingan pendamping 1 kecamatan Bancar dibagikan jumlah kelompok yang ada maka hasil yang diperoleh yakni jumlah KPM kurang lebih sejumlah 21-22 KPM dalam setiap kelompok.

Menurut hasil wawancara Informan 2 (CWP_2) menyatakan bahwa Jumlah KPM setiap kelompok berbeda-beda, karena disesuaikan dengan jarak rumah KPM, namun sesuai pembagian dari pusat yaitu jumlah KPM tiap kelompok maksimal 40 kelompok.

Pendamping 2 kecamatan Bancar, jumlah KPM 304 sementara jumlah mencapai 11 kelompok. Sehingga jika dibagikan maka jumlah KPM di setiap kelompok dampingan pendamping 2 kecamatan Bancar mencapai ± 27 KPM. Sementara pendamping 3 di kecamatan Bancar, jumlah kelompok mencapai 319 kelompok dan jumlah KPM mencapai 11 kempot. Sehingga dari jumlah yang telah disebutkan, maka jumlah KPM pada setiap kelompok pendamping 3 sejumlah ± 29 KPM.

Jumlah KPM di wilayah dampingan pendamping 4 dan 5 mencapai 279 KPM dan 286 KPM. Sementara jumlah kelompok pada kedua wilayah dampingan tersebut mencapai 12 kelompok. Hasil pembagian jumlah

KPM dengan jumlah kelompok menunjukkan bahwa jumlah KPM setiap kelompok pendamping 4 dan 5 mencapai ± 23 KPM.

Pendamping 6 dan 7 memiliki KPM sejumlah 294 dan 302 KPM, sedangkan jumlah kelompok mencapai 14 dan 21. Sehingga KPM untuk wilayah dampingan pendamping 6 dan 7 kecamatan Bancar adalah sejumlah ± 21 dan ± 14 KPM di setiap kelompoknya.

Sementara pada pendamping 8 dan 9 jumlah KPM mencapai 282 dan 278 yang dibagi menjadi 12 dan 10 kelompok sehingga didapatkan jumlah KPM sebanyak ± 23 dan ± 27 KPM setiap kelompok.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah KPM di setiap kelompok dampingan pendamping 1 sampai dengan 9 di kecamatan Bancar tidak mencapai 40 KPM di setiap kelompoknya.

Tabel 4. 6 Data pembagian KPM per Kelompok Kecamatan Bancar tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah KPM per Kelompok |
|----|--------------|-------------------------|
| 1 | Pendamping 1 | ± 21 |
| 2 | Pendamping 2 | ± 27 |
| 3 | Pendamping 3 | ± 29 |
| 4 | Pendamping 4 | ± 23 |
| 5 | Pendamping 5 | ± 23 |
| 6 | Pendamping 6 | ± 21 |
| 7 | Pendamping 7 | ± 14 |
| 8 | Pendamping 8 | ± 23 |
| 9 | Pendamping 9 | ± 27 |

Sumber: Data pembagian kelompok kecamatan bancar (Data diolah)

Sedangkan data pembagian kelompok dampingan di kecamatan Jatirogo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Data pembagian kelompok kecamatan Jatirogo tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah Kelompok | Jumlah KPM |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendamping 1 | 12 | 254 |
| 2 | Pendamping 2 | 11 | 231 |
| 3 | Pendamping 3 | 13 | 261 |
| 4 | Pendamping 4 | 14 | 302 |
| 5 | Pendamping 5 | 12 | 289 |
| Jumlah | | 62 | 1337 |

Sumber: Data pembagian kelompok kecamatan jatirogo (Data diolah)

Dari data yang diperoleh di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah kelompok pada wilayah dampingan pendamping 1, 2 dan 3 mencapai 12, 11, 13 kelompok, sementara jumlah KPM mencapai 254, 231, dan 261. Sehingga diperoleh hasil tiap kelompok mencapai ± 27 , ± 21 , dan ± 20 KPM tiap kelompoknya.

Sedangkan jumlah kelompok pada wilayah dampingan pendamping 4 dan 5 sejumlah 302 dan 289 KPM, serta jumlah kelompok mencapai 14 dan 12 kelompok. Sehingga hasil pembagian kelompok didapatkan hasil ± 21 dan ± 24 KPM tiap kelompoknya.

Dari hasil pembagian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah dampingan kecamatan Jatirogo, tiap kelompok tidak mencapai 40 KPM. Data pembagian kelompok dapat dilihat pada kolom di bawah ini:

Tabel 4. 8 Data pembagian KPM per Kelompok kecamatan Jatirogo tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah KPM per Kelompok |
|----|--------------|-------------------------|
| 1 | Pendamping 1 | ± 27 |
| 2 | Pendamping 2 | ± 21 |
| 3 | Pendamping 3 | ± 20 |
| 4 | Pendamping 4 | ± 21 |
| 5 | Pendamping 5 | ± 24 |

Sumber: Data pembagian per kelompok kecamatan jatirogo (Data diolah)

Pada lokasi penelitian yang ketiga yakni kecamatan Senori, hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Data pembagian kelompok kecamatan Senori tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah Kelompok | Jumlah KPM |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pendamping 1 | 14 | 340 |
| 2 | Pendamping 2 | 12 | 349 |
| 3 | Pendamping 3 | 13 | 343 |
| 4 | Pendamping 4 | 11 | 268 |
| 5 | Pendamping 5 | 10 | 296 |
| 6 | Pendamping 6 | 10 | 309 |
| 7 | Pendamping 7 | 10 | 260 |
| Jumlah | | 80 | 2165 |

Sumber: Data pembagian kelompok kecamatan senori (Data diolah)

Sesuai data hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada wilayah dampingan pendamping 1 dan 2 memiliki jumlah KPM sebanyak 340 yang dibagi menjadi 14 kelompok maka hasil yang diperoleh adalah 14 KPM per kelompok. Sementara pada data Pendamping 2, jumlah KPM mencapai 349 yang dibagi ke dalam 12 kelompok,

maka hasilnya adalah 29 KPM per kelompok.

Sedangkan untuk pendamping 3 dan 4, menurut hasil data yang diolah memiliki jumlah kelompok sebanyak 343 dan 268 yang terbagi menjadi 13 dan 11 kelompok. Sehingga jumlah KPM pendamping 3 dan 4 mencapai ± 26 dan ± 24 KPM di setiap kelompoknya.

Untuk pendamping 5, 6, dan 7 memiliki KPM dampingan sejumlah 296, 309, dan 260 yang ketiganya terbagi menjadi 10 kelompok dampingan. Dari hasil pembagian di ketiga wilayah dampingan pendamping 5, 6, dan 7 menunjukkan hasil sejumlah ± 29 , ± 30 , dan ± 26 KPM di setiap kelompok dampingan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah KPM dampingan pendamping 1 sampai dengan 7 di wilayah kecamatan senori mencapai kurang dari 40 KPM. Data Pembagian kelompok di kecamatan senori dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4. 10 Data pembagian KPM per Kelompok kecamatan Senori tahun 2023

| No | Pendamping | Jumlah KPM per Kelompok |
|----|--------------|-------------------------|
| 1 | Pendamping 1 | ± 17 |
| 2 | Pendamping 2 | ± 29 |
| 3 | Pendamping 3 | ± 26 |
| 4 | Pendamping 4 | ± 24 |
| 5 | Pendamping 5 | ± 29 |
| 6 | Pendamping 6 | ± 31 |
| 7 | Pendamping 7 | ± 26 |

Sumber: Data pembagian per kelompok kecamatan Senori (Data diolah)

(c) Pihak Eksternal

Pihak eksternal adalah pihak diluar PKH yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan pembelajaran P2K2.

Menurut hasil wawancara, dalam pembelajaran P2K2 terdapat pihak eksternal yang terlibat seperti pihak kesehatan yang membantu menyampaikan modul terkait kesehatan. Dalam prosesnya, pendamping meminta bantuan kepada pihak kesehatan untuk ikut serta dalam memberikan materi yang berkaitan dengan kesehatan, seperti materi pada modul gizi dan kesehatan keluarga. Informan 1 (CWP_1) menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya kadang dibantu kader kesehatan untuk mensosialisasikan tentang gizi dan kesehatan keluarga soalnya mereka yang lebih paham jadi lebih mudah dipahami KPM pak.”

c) Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang sangat penting setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Adanya pelaporan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah terlaksana karena dalam laporan berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan apa yang telah dilakukan serta hasil capaian kegiatan.

Pelaporan dalam PKH di kabupaten Tuban terdiri dari 3 macam, sebagaimana disampaikan oleh Informan 3 (CWP_3) yang mengemukakan bahwa pelaporan pendamping dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya:

1) Laporan Harian

Laporan harian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pendamping yakni setiap pendamping melaporkan kegiatan harian pada aplikasi e-SDM. Proses selanjutnya, apabila laporan sudah sesuai

dengan petunjuk teknis, kemudian dilakukan persetujuan (*approve*) oleh bagian koordinator kabupaten. Laporan harian dikatakan telah sesuai apabila dalam laporan telah tercantum jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, bentuk kegiatan seperti apa dan dokumentasi kegiatan.

2) Laporan Bulanan

Laporan bulanan adalah laporan yang dilakukan oleh pendamping setiap bulan yang berisi rangkuman seluruh kegiatan yang telah dikerjakan selama satu bulan. Ada perbedaan dengan laporan harian dan bulan yakni jika laporan harian dilakukan dengan cara mengunggah laporan di aplikasi *e-SDM*, maka untuk laporan bulan, pendamping harus menyerahkan bukti fisik laporan kepada koordinator kabupaten (Korkab) PKH. Beberapa instrumen dalam laporan bulan adalah rencana kegiatan bulan yang dilaporkan, realisasi dari rencana dengan didukung foto kegiatan, dan rencana bulan yang akan datang, serta kendala-kendala yang dihadapi pendamping saat dilapangan selama satu bulan.

3) Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan laporan pada kegiatan tertentu yang dilaporkan secara khusus kepada kementerian sebagai pertanggungjawaban kegiatan P2K2 pendamping. Selain laporan terkait P2K2, pada laporan kegiatan ini juga memuat laporan terkait lansia. Laporan kegiatan ini dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Isi laporan kegiatan mencakup seluruh kegiatan P2K2 yang dilakukan selama 3 bulan dengan penjabaran sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan kegiatan P2K2,
- Kelompok mana saja yang mengikuti P2K2
- Modul apa saja yang disampaikan dalam P2K2

- Output yang diperoleh setelah kegiatan P2K2
- Foto kegiatan pendamping saat melakukan P2K2.

Laporan kegiatan ini selain dilaporkan secara langsung kepada kementerian ketenagakerjaan, juga dimasukkan ke dalam laporan harian dan laporan bulan.

b. Kendala dalam Pelaksanaan P2K2

Dalam pelaksanaan setiap program tidak terlepas dari adanya kendala, hal tersebut juga dialami dalam implementasi pelaksanaan P2K2. Hasil penemuan mengemukakan bahwa kendala pelaksanaan diidentifikasi oleh pendamping baik sebelum maupun ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Pada proses ini, pendamping melakukan identifikasi masalah yang dapat menghambat proses pembelajaran P2K2.

Menurut hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada pelaksanaan P2K2 di Kabupaten Tuban diantaranya adalah:

1) Geografis

Kendala geografis adalah kendala yang disebabkan oleh faktor geografis seperti tata letak yang jauh. Hasil wawancara menunjukkan ketidakhadiran KPM dalam pelaksanaan P2K2 dikarenakan jarak antar rumah warga yang cukup jauh, sehingga ketika terjadi hujan banyak KPM yang tidak bisa datang. Sebagaimana hasil wawancara Informan 1 (CWP_1) menyatakan bahwa:

“kadang KPM tidak berangkat, karena cuaca, terus jarak antar rumah yang jauh.”

2) Sarana

Sarana merupakan suatu alat yang tidak bergerak yang digunakan untuk membantu dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana dalam proses pembelajaran P2K2 sangat diperlukan karena dapat membantu proses penyampaian materi agar KPM lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Disamping itu, sarana yang lengkap akan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Kendala yang banyak dialami pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2 adalah kurangnya sarana penunjang proses pembelajaran. Hal ini terjadi dikarenakan sarana yang dimiliki oleh pendamping satu sama lain berbeda. Perbedaan ini terjadi karena alat yang diperoleh oleh pendamping setelah diklat P2K2 berbeda-beda.

Kekurangan sarana/alat yang terjadi sesuai hasil observasi pelaksanaan pembelajaran P2K2 pada lokasi 1 menunjukkan bahwa ketika pendamping memberikan tugas kepada KPM untuk mengisi buku pintar, namun KPM tidak memiliki buku pintar. Sehingga, pendamping berinisiatif memberikan kertas kosong kepada KPM untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendamping.

Hasil observasi lokasi 2 juga menunjukkan hal yang serupa yakni pendamping tidak memiliki *flipchart* yang sangat dibutuhkan untuk membantu proses penyampaian materi agar lebih mudah dipahami KPM, sehingga pendamping membuat *flipchart* sendiri dengan memanfaatkan kertas plano untuk membuat materinya.

Sehingga dalam proses pembelajaran P2K2, pendamping harus berpikir kreatif mungkin untuk membuat alat-alat yang diperlukan agar penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara pada Informan 2 (CWP_2) yakni *“KPM ada yang tidak datang, selain itu untuk materi stunting terkendala belum adanya flipchart yang berisi materi stunting.”*

Tidak hanya kekurangan sarana *flipchart* dan buku pintar, namun juga kekurangan sarana modul pelatihan yang seharusnya wajib dibagikan kepada KPM untuk digunakan sebagai pegangan KPM. Hal ini sesuai hasil wawancara Informan 7 (CWKC_2) yaitu :

“kurangnya media, flip chart masih kurang, sehingga pendamping kadang jarang memakai media, “belum semua desa KPM menerima modul, kira-kira baru sekitar 4 desa.”

3) Latar Belakang yang Pekerjaan dan Pendidikan

KPM PKH terdiri dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Seperti kondisi yang terjadi di 3 lokasi penelitian yang menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan KPM di Bancar rata-rata adalah petani serta nelayan. Berbeda dengan di Jatirogo, KPM rata-rata bekerja sebagai pedagang maupun petani. Sedangkan di senori rata-rata adalah petani. Perbedaan latar belakang pekerjaan KPM menyebabkan pendamping sulit untuk menentukan jadwal pertemuan pembelajaran P2K2.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 7 (CWKC_2) mengatakan bahwa:

“KPM memiliki latar belakang berbeda, pekerjaan yang berbeda-beda ada yang kerja pagi, ada yang kerja siang sehingga kesulitan untuk penentuan jadwal FDS.”

Selain latar belakang pekerjaan yang berbeda, kendala yang dihadapi juga disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda. KPM PKH terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, seperti tidak sekolah, lulusan SD, lulusan SMP, serta lulusan SMA. Sehingga adanya perbedaan ini menyebabkan penyampaian materi yang terhambat. Seperti hasil wawancara dengan Informan 7 (CWKC_2) yang mengalami perbedaan latar belakang pendidikan KPM seperti:

“kategori KPM banyak yang lansia, akhirnya susah diberi penjelasan materi FDS, karena tidak paham sama sekali.”

c. Strategi Pelaksanaan P2K2

Dalam pelaksanaan P2K2, pendamping beberapa kali mendapatkan kendala – kendala yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, pendamping diharuskan untuk membuat strategi-strategi untuk menghadapi kendala tersebut agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan P2K2.

Hasil penelitian menunjukkan strategi apa saja yang dilakukan oleh pendamping untuk menghadapi permasalahan yang sering terjadi. Strategi tersebut dibagi menjadi 2 yakni:

1) Strategi Inovasi

Strategi inovasi merupakan strategi yang dilakukan oleh pendamping PKH dalam menghadapi kendala yang terjadi ketika proses pembelajaran P2K2 berlangsung. Dalam pelaksanaan P2K2 masih banyak ditemukan kendala teknis seperti kurangnya sarana penunjang sehingga menghambat kegiatan. Oleh sebab itu, dalam strategi inovasi ini, pendamping diharuskan untuk berpikir kreatif untuk menyediakan sarana pengganti yang sebelumnya tidak ada.

Hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) yang mengungkapkan:

“Untuk materi yang belum tersedia seperti materi stunting, maka pendamping mendownload sendiri materinya kemudian dicetak dan dibuat flip cart menggunakan kertas plano”

2) Strategi Penguatan

Strategi penguatan merupakan upaya pemberian motivasi yang dilakukan oleh pendamping kepada KPM. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemberian motivasi oleh pendamping dilakukan pada saat pertemuan kelompok dan setelah pembelajaran P2K2.⁸

Menurut hasil wawancara, pemberian motivasi dilakukan agar KPM tidak ketergantungan dengan bantuan yang diberikan dan mulai belajar mandiri dengan cara menjalankan usaha yang sebelumnya telah dimiliki KPM. Disamping itu, motivasi juga diberikan untuk pemberitahuan terkait usia minimal lansia yang bisa memperoleh bantuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 5 (CWKP_2) yakni:

“motivasi untuk lebih mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan, KPM dituntut untuk berusaha sendiri dalam menjalankan usaha yang sudah dimiliki. Selain itu, untuk lansia ditekankan pada ketentuan usia lansia yang mendapatkan bantuan.”

⁸ CWKP_3, Form Catatan Hasil Wawancara 20/03/2023 (2023).

3) Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan cara pendamping berkomunikasi selama P2K2 baik sebelum, proses, hingga setelah pembelajaran.

Komunikasi dengan KPM PKH merupakan hal utama yang dilakukan oleh pendamping, sehingga pendamping harus memiliki strategi yang tepat untuk berkomunikasi agar penyampaian informasi tidak terhambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pendamping dalam pelaksanaan P2K2 adalah sebagai berikut:

(a) Komunikasi Informatif

Komunikasi informatif dilakukan oleh pendamping pada saat penyampaian materi yang terdiri dari 5 modul. Selain materi, informasi yang disampaikan oleh pendamping berupa informasi tambahan yang disesuaikan dengan modul yang sedang dipelajari. Hasil wawancara dengan Informan 4 (CWKP_1) yaitu

“pendamping memberikan kami materi tentang jumlah bantuan yang akan diterima.”

Materi-materi yang disampaikan pada saat P2K2 merupakan materi baru bagi KPM, sehingga pendamping harus menyampaikannya dengan bahasa yang mudah untuk diterima oleh KPM. Sesuai hasil pengamatan yakni ketika proses penyampaian materi P2K2, pendamping menyampaikannya dengan cara yang lugas dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh KPM.

(b) Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif dilakukan oleh pendamping dalam memberikan motivasi serta mengajak KPM untuk melakukan hal yang sesuai modul yang telah dijelaskan, sebagaimana hasil observasi yakni pendamping mengajak KPM untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan.

Disamping itu, pendamping memberikan juga motivasi serta sosialisasi kepada KPM PKH.

Sesuai hasil observasi menunjukkan bahwa pendamping memotivasi KPM untuk lebih mandiri dengan tidak bergantung kepada bantuan yang diberikan, serta mengajak KPM yang telah mampu untuk bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Hasil wawancara dengan Informan 6 (CWKP_3) yakni:

“diberikan motivasi oleh pendamping, sosialisasi PKH.”

(c) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal dilakukan oleh pendamping PKH di kabupaten Tuban dengan beberapa pihak, diantaranya KPM PKH, antar pendamping, serta dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan P2K2 PKH.

Komunikasi interpersonal pendamping dengan KPM PKH dilaksanakan dengan cara mengajak KPM untuk berdiskusi dalam pelaksanaan P2K2. Diskusi yang dilakukan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P2K2 seperti berdiskusi tentang materi berupa Tanya jawab, kesepakatan penentuan jadwal, kendala yang dialami KPM, serta berkaitan dengan kehadiran KPM.

Di sela-sela proses penyampaian materi, pendamping juga melakukan tanya jawab kepada KPM untuk mengetahui tingkat pemahaman KPM terhadap materi yang sedang diajarkan, serta mengajak bermain agar KPM merasa nyaman selama proses pembelajaran P2K2. Hasil wawancara dengan Informan 3 (CWP_3) yakni:

“mengajak bermain, tanya jawab dan menggunakan media penunjang lainnya agar KPM merasa nyaman dalam pelaksanaan p2k2.”

Dalam kesepakatan penentuan jadwal pelaksanaan P2K2, pendamping senantiasa mengajak KPM untuk berdiskusi kapan waktu

yang tepat untuk dilaksanakan pembelajaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendamping selalu mengajak berdiskusi KPM dalam pembuatan jadwal pelaksanaan P2K2 agar semua KPM bisa hadir selama proses pembelajaran berlangsung. Sesuai hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) yaitu:

“mengatur jadwal yang disesuaikan sama jadwal KPM, biar bisa berangkat semua.”

Sejalan dengan ungkapan Informan 1 (CWP_1) dan Informan 6 (CWKC_1) juga menyatakan hal serupa yakni

“membuat kesepakatan bersama untuk penentuan jadwal FDS agar KPM bisa datang semua”

Jika jadwal yang ditentukan sebelumnya masih ditemukan banyak KPM yang tidak hadir, maka dilakukan penjadwalan ulang agar semua bisa hadir. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 8 (CWKC_3) yakni pendamping mengatur ulang jadwal P2K2 kalau banyak yang tidak hadir.

Selain digunakan untuk membuat kesepakatan penentuan jadwal, komunikasi interpersonal juga dilakukan oleh pendamping PKH untuk menanyakan alasan ketidakhadiran KPM selama pelaksanaan pembelajaran P2K2. Sesuai hasil wawancara dengan Informan 2 (CWP_2) yakni:

“KPM yang tidak hadir didatangi satu-satu untuk menanyakan alasannya apa, sehingga KPM ada rasa sungkan dan akhirnya datang saat pelaksanaan P2K2.

Komunikasi interpersonal juga dilakukan oleh pendamping dengan pihak-pihak terkait seperti antar pendamping PKH yang ada di kabupaten Tuban. Informan 8 (CWKC_3) mengungkapkan bahwa sering dilakukan sharing antar pendamping terkait masalah yang dialami

oleh KPM dampingannya masing-masing, hal tersebut dilakukan agar pendamping dapat mengetahui pengalaman antar pendamping bagaimana menghadapi masalah di wilayah dampingan dan bagaimana solusi memecahkan masalah tersebut. Karena adanya sharing antar pendamping dapat menjadi solusi agar pendamping saling belajar dari pengalaman yang telah dialami pendamping lainnya.

Menurut pemaparan Informan 2 (CWP_2), Komunikasi interpersonal dilakukan oleh pendamping dengan pihak-pihak terkait diantaranya:⁹

- (1) Pemerintah desa, komunikasi interpersonal dilakukan oleh pendamping dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi terkait program PKH seperti P2K2 dan lain-lain.
- (2) Dinas koperasi dan perdagangan, komunikasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk koordinasi terkait bagaimana pendirian UMKM oleh KPM PKH.
- (3) Dinas sosial bidang pemberdayaan, tujuan dilakukan komunikasi adalah untuk memberikan support kepada KPM yang telah graduasi atau dianggap sudah mampu dan mandiri agar bisa meningkatkan perekonomiannya melalui pemberdayaan oleh dinas terkait.

Informan 3 (CWP_3) menambahkan tujuan lebih spesifik terkait komunikasi dengan pihak-pihak terkait sesuai hasil wawancara yaitu:

“koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar membantu memfasilitasi jalannya kegiatan”

3. Efektivitas P2K2 Terhadap Tingkat Graduasi KPM PKH

a. Pemahaman Program P2K2

Program P2K2 dalam PKH memiliki peran penting dalam memberikan stimulus agar terciptanya perubahan perilaku KPM PKH menjadi lebih mandiri. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap program P2K2 sangat dibutuhkan oleh

⁹ CWK_2, “Catatan Wawancara Korcam 2,” 2023.

pendamping maupun KPM PKH karena kedua komponen tersebut yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan P2K2. Sebagaimana pernyataan Informan 1 (CWP_1) dalam wawancara yakni:

“P2K2 itu kegiatan pembelajaran untuk merubah pola pikir KPM.”

Pengertian serupa juga disebutkan oleh Informan 3 (CPW_3) dalam wawancara yakni:

“P2K2 itu proses belajar yang terstruktur yang memiliki tujuan adanya percepatan pada perubahan perilaku KPM”

Sesuai hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa perubahan perilaku adalah kunci utama dilaksanakannya program pemberdayaan P2K2.

Selain itu, bentuk pemahaman program P2K2 juga dilakukan oleh pendamping PKH yang dimulai dari sosialisasi dengan pihak pemerintah desa terkait bagaimana P2K2 dan apa tujuan dilaksanakannya program tersebut. Setelah itu, pendamping memberikan sosialisasi berupa pelaksanaan P2K2 kepada KPM PKH yang sebelumnya telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok.

Dalam pelaksanaan P2K2, pendamping selaku fasilitator memiliki peran penting yaitu memberikan materi sesuai dengan modul yang telah ada agar bisa meningkatkan kemampuan KPM. Selain itu, pendamping memiliki tugas untuk memberikan motivasi kepada KPM agar bisa lebih mandiri dan keluar dari kemiskinan, serta merubah pola pikir KPM agar lebih mandiri terutama pada sektor finansial. Hasil wawancara terkait pentingnya P2K2 menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 harus senantiasa dilaksanakan. Informan 2 (CWP_2) mengungkapkan bahwa:

“P2K2 merupakan ruhnya dari PKH, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan.”

Sedangkan program pembelajaran pada P2K2 dilihat dari sudut pandang KPM PKH, P2K2 merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan menyampaikan materi-materi seperti bagaimana

cara mengatur keuangan keluarga, mendidik anak yang baik dan benar, serta sosialisasi terkait jumlah bantuan yang diterima oleh KPM yang disesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 4 (CWKP_1) yakni:

“Belajar bareng pendamping soal mengatur uang dan mendidik anak, selain itu dikasih tahu juga soal jumlah bantuan yang didapat jadi kami tidak bingung”

Tingkat pentingnya program pembelajaran P2K2 dinilai sangat penting oleh KPM PKH karena P2K2 dapat digunakan untuk bekal hidup untuk masa depan. Selain itu, adanya P2K2 juga mampu memberi tambahan ilmu baru untuk KPM PKH yang dapat digunakan untuk keluarga.

b. Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan suatu program terdapat hal-hal yang ingin dituju atau ingin diraih. Sasaran pada pelaksanaan program pembelajaran P2K2 adalah KPM PKH. Pada hasil wawancara Informan 2 (CWP_2) memaparkan bahwa sasaran dari P2K2 di kabupaten Tuban adalah KPM PKH, sehingga program ini bersifat wajib untuk diikuti seluruh KPM PKH.

Seluruh KPM PKH yang mengikuti program pembelajaran P2K2 adalah kepala keluarga atau yang mewakili, sehingga dalam satu kelompok P2K2 terdiri dari berbagai macam latar belakang diantaranya adalah:

1) Pendidikan KPM

Hasil wawancara Informan 10 (CWKK_1) bahwa dalam satu kelompok memiliki tingkat pendidikan yang beraneka ragam seperti dari lulusan SD, SMP, hingga SMA, bahkan masih banyak KPM yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, dan tidak sedikit KPM yang masih buta huruf. Sehingga adanya perbedaan latar belakang pendidikan KPM menyebabkan kendala dalam penerimaan materi.

Latar pendidikan KPM yang rata-rata masih rendah menjadikan KPM sulit dalam menerima materi pada modul yang mengharuskan untuk menulis dan berhitung. Pada pembelajaran modul pengelolaan keuangan keluarga, dalam proses pembelajaran KPM diminta untuk menulis pengeluaran dan pemasukan dari keluarga masing-masing untuk kemudian dihitung

secara bersama-sama agar mengetahui tingkat kesehatan keuangan keluarga. Sehingga kesulitan dalam menulis dan menghitung dapat menghambat berjalannya proses pembelajaran KPM yang lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) yakni:

"karena ini program wajib, jadi setiap KPM harus mengikutinya. Namun karena latar belakang pendidikan KPM yang rata-rata rendah bahkan masih banyak ditemukan KPM tidak mengenyam pendidikan, sehingga akan sulit menerima materi seperti pada modul 2 yang menekankan KPM untuk menulis dan berhitung"

2) Komponen yang dimiliki

Untuk menjadi KPM PKH, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki mencakup anak usia wajib belajar, anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada setiap penerima KPM PKH yakni ada yang memiliki komponen balita, namun KPM lainnya memiliki komponen lansia dan sebagainya.

Meurut pemaparan Informan 3 (CWP_3) yakni perbedaan komponen yang dimiliki KPM PKH menjadi penghambat selama proses pembelajaran P2K2. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan komponen dapat dilihat seperti pada proses pembelajaran pada modul pengasuhan anak yang mengajarkan bagaimana peran orang tua dalam mengasuh dan memperhatikan tumbuh kembang anak, namun beberapa KPM memiliki komponen lansia. Kasus lain yang terjadi yaitu pada modul kesehatan dan gizi ibu hamil namun banyak KPM yang memiliki komponen lansia, sehingga materi tersebut tidak dibutuhkan.

Sepertihalnya pemaparan Informan 1(CWP_1) yaitu:

"Selain itu, latar belakang kategori KPM yang berbeda, seperti KPM lansia yang tidak membutuhkan materi untuk mengasuh anak dll."

3) Usia

Perbedaan usia KPM dalam satu kelompok menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran P2K2. Dalam satu kelompok terdapat rentan usia yang berbeda-beda yaitu ada yang berusia 30-an, namun ada juga yang berusia lanjut. Kasus yang pernah terjadi yakni pada materi pengelolaan keuangan keluarga, untuk KPM lansia mengalami kebingungan karena materi tersebut membutuhkan untuk menulis dan berhitung. Disamping itu, perbedaan usia KPM menyebabkan daya tangkap KPM dalam menerima materi yang diajarkan berbeda.

Pendamping juga mengalami kesulitan dalam cara berkomunikasi untuk menyampaikan materi karena adanya perbedaan usia.

Seperti halnya penjelasan Informan 1 (CWP_1) dalam wawancara adalah sebagai berikut:

“Usia KPM berbeda beda, jadi daya tangkapnya juga beda”

c. Tepat Waktu

Pada pelaksanaan P2K2, waktu diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi yakni waktu pelaksanaan dan durasi pelaksanaan. Kedua klasifikasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan mencakup jumlah pelaksanaan program P2K2 tiap bulan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang terjadi pada ketiga lokasi penelitian.

Pada lokasi yang pertama yakni wilayah kecamatan Jatirogo, pelaksanaan P2K2 pada mulanya dilakukan secara rutin satu bulan sekali, namun karena terdapat kendala seperti pendamping yang dipindah tugaskan ke wilayah lain menyebabkan pendamping harus menyesuaikan dengan wilayah dampingan baru.

Permasalahan terjadi ketika pendamping yang sebelumnya telah melakukan P2K2 di wilayah sebelumnya telah mencapai modul 4 namun di wilayah yang baru terkadang ditemukan belum melakukan P2K2 sama sekali, sehingga pendamping diharuskan untuk memulai dari awal materi. Disamping itu,

permasalahan yang terjadi yakni tugas pendamping juga banyak ke ranah teknis seperti adanya verifikasi dan validasi data kemiskinan yang harus diperbarui, menangani permasalahan KPM yang mengharuskan pendamping untuk turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tiap KPM, serta tugas tambahan dari dirjen lain. Hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan P2K2, karena waktu pelaksanaan yang telah dijadwalkan terhambat oleh tugas lain yang harus segera diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 1 (CPW_1) adalah sebagai berikut:

“dulu awal-awal rutin 1 bulan sekali, setelah pindah-pindah dampingan akhirnya menyesuaikan dengan dampingan baru, karena kadang dampingan baru ada yang sama sekali belum pernah dilaksanakan P2K2, tugas pendamping akhir-akhir ini lebih ke teknis seperti verifikasi dan validasi data kemiskinan, beberapa tugas dari dirjen lain, terus menyelesaikan permasalahan dari pengaduan KPM sehingga kegiatan pendamping banyak dihabiskan untuk turun ke lapangan untuk menjumpai KPM secara langsung satu per satu.”

Pada lokasi yang kedua yakni wilayah kecamatan Bancar, pelaksanaan program pembelajaran P2K2 dilakukan secara rutin satu bulan sekali, dan merata di seluruh kecamatan. Hasil wawancara dengan Informan 2 (CWP_2) sebagai berikut:

“setiap bulan satu kali setiap kelompok dan seluruh pendamping yang mendampingi desa lain rata-rata juga sama”

Sedangkan pada lokasi yang ketiga yakni wilayah kecamatan Senori, pada awalnya pelaksanaan program pembelajaran P2K2 dilakukan secara rutin satu bulan sekali, namun seiring berjalannya waktu adanya kendala menyebabkan pelaksanaan P2K2 dilakukan selama tiga bulan sekali, dan sekarang semakin

berkurang hingga yang dilakukan hanya pertemuan kelompok saja. Hasil wawancara dengan Informan 9 (CWKC_3) menyebutkan sebagai berikut:

“awalnya ya rutin tapi jadi 3 bulan sekali di setiap kelompok, tapi juga ada pendamping yang melakukan setiap bulan. Dan sekarang beberapa hanya pertemuan kelompok saja”

Hasil penelitian untuk waktu pelaksanaan pada ketiga lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Tabel waktu pelatihan

| Kecamatan | Waktu Pelaksanaan P2K2 |
|-----------|--|
| Jatirogo | Rutin 1 bulan sekali, namun tidak merata untuk seluruh wilayah dampingan |
| Bancar | Rutin 1 bulan sekali dan dilakukan oleh semua wilayah dampingan |
| Senori | Ada yang rutin, ada yang 3 bulan sekali, namun sekarang beberapa dampingan hanya pertemuan kelompok saja |

Sumber : Hasil Wawancara (Data Diolah)

2) Durasi Pelaksanaan

Durasi waktu mencakup berapa lama waktu yang dihabiskan dalam satu kali pertemuan. Hasil penelitian di ketiga lokasi penelitian yang dipilih semua menyebutkan bahwa durasi pelaksanaan P2K2 untuk setiap sesi dilakukan selama 1 jam 30 menit sampai 2 jam.

d. Tercapainya Tujuan

Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tercapainya tujuan P2K2 adalah adanya perubahan perilaku dan pola pikir KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan P2K2 belum tercapai, hal ini karena perubahan yang terjadi pada pola pikir seseorang sulit untuk terjadi secara langsung dan memerlukan waktu yang lama karena pola pikir lama telah

tertanam sejak lama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 2 (CWP_2) sebagai berikut:

“Belum sepenuhnya, ya karena merubah pola pikir memang sangat sulit dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Ditambah cara pandang KPM sebelumnya yang sudah tertanam sejak lama jadi sulit.”

e. Perubahan Nyata

Pada penelitian ini, perubahan nyata dilihat dari dampak apa yang ditimbulkan setelah diberikan materi selama dilaksanakannya P2K2 yang terbagi menjadi lima modul yakni:

1) Modul Kesehatan dan Gizi

Perubahan yang terjadi setelah diberikan materi terkait kesehatan dan Gizi adalah KPM mulai sadar terkait kesehatan keluarga. Sebelum diberikan materi terkait kesehatan dan gizi, KPM masih memeriksakan kandungan jika sakit saja, namun sekarang KPM mulai sadar dan mulai memeriksakan kandungan ke posyandu secara rutin selama dan sesudah kehamilan. Seperti penjelasan CWP_1 sebagai berikut:

“Dulu KPM kalau sakit aja baru periksa sekarang sudah berbeda, KPM mulai sadar dengan gizi dan kesehatan keluarga dan mulai memeriksakan ke posyandu dll.”

Perubahan lainnya yang terjadi adalah pada kesadaran KPM terhadap pentingnya menjaga gizi melalui pola konsumsi yang benar. KPM sudah mampu mempraktekkan bagaimana cara memasak masakan yang sehat agar gizi pada masakan tetap terjaga. Selain itu, KPM juga sudah mampu mengolah masakan sehat dengan bahan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan KPM. Seperti hasil wawancara dengan CWP_2 sebagai berikut:

“KPM sudah mampu mempraktekkan cara memasak masakan sehat dengan disesuaikan kondisi keuangan dan bahan yang ada.”

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang terjadi seperti bahan makanan yang memiliki banyak

gizi namun harganya mahal. Selain itu, Kondisi rumah KPM yang kecil, sehingga jarak kamar mandi dan tempat memasak berdekatan, hal ini dapat mempengaruhi gizi dari masakan yang diolah.

2) Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Hasil penelitian menunjukkan perubahan nyata yang terjadi setelah adanya materi pada modul pendidikan dan pengasuhan anak adalah perilaku membentak anak sudah mulai berkurang. Hasil wawancara dengan Informan 1 (CWP_1) menunjukkan bahwa:

“KPM mulai tidak suka membentak anaknya.”

Jika sebelumnya KPM selalu menggunakan kekerasan ketika anak melakukan kesalahan, sekarang sudah mulai bisa menjaga cara bicara untuk tidak membentak dan tidak melakukan kekerasan kepada anak. Penelitian melalui wawancara dengan Informan 2 (CWP_2) menunjukkan bahwa:

“sudah tidak menggunakan kekerasan, cara bicara ibu dalam mendidik anak juga sudah ada perubahan, tidak membentak.”

Perubahan nyata lainnya yang terjadi adalah kesadaran KPM terhadap pentingnya anak untuk mengenyam pendidikan makin tinggi, banyak KPM yang mulai menyekolahkan anaknya dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga ke tingkat SMA.

Terdapat beberapa kendala dan menjadi tantangan untuk pendamping dalam menyampaikan materi serta memotivasi KPM akan pentingnya pendidikan. Menurut Informan 4 (CWKC_1) bahwa kendala yang terjadi adalah pola pendidikan KPM yang masih menggunakan pola pemikiran zaman dulu, sehingga sangat sulit untuk merubah pola pemikiran tersebut.

Di samping itu, menurut Informan 4 (CWKC_1) yakni budaya patriarki masih sangat melekat dan masih banyak ditemukan pada KPM. Laki-laki masih

dianggap memiliki kekuasaan tertinggi di keluarga dan kesadaran laki-laki masih sangat rendah. Sehingga perempuan dianggap memiliki tanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga terutama dalam mengasuh dan mendidik anak. Padahal seharusnya mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas harus dilakukan oleh kedua orang tua bukan hanya oleh ibu saja.

“masih banyak yang pakai budaya jaman dulu, ya pokoknya yang ngurus rumah itu yang perempuan”

3) Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha

Permasalahan keuangan yang melekat pada KPM PKH adalah pengeluaran yang lebih banyak dari pemasukan yang diterima. Sehingga KPM dituntut untuk bisa mengelola dan mengatur prioritas dalam penggunaan biaya agar pengeluaran dan pendapatan bisa seimbang.

Perubahan nyata yang dialami KPM adalah mampu mengatur keuangan dengan lebih baik. Sebelum KPM masuk ke dalam program PKH, KPM cenderung menggunakan keuangan secara tidak tepat sehingga menyebabkan jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dan berakhir dengan berhutang. Setelah adanya P2K2, KPM mampu lebih berhati-hati dalam berbelanja, serta penggunaan keuangan menjadi lebih tertata sesuai prioritas.

Informan 3 (CWP_3) menjelaskan bahwa KPM sudah mempraktikkan sistem amplop untuk mengatur pengeluaran. Pendapatan yang diterima oleh KPM dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagi sesuai pengeluaran misalkan amplop untuk belanja, amplop biaya sekolah, amplop biaya listrik, dan lain-lain. Setelah pembagian amplop, KPM dapat menggunakan sesuai dengan amplop yang telah dibagi, sehingga pengeluaran bisa disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Selain penggunaan keuangan yang lebih tertata, menurut Informan 4 (CWKC_1) KPM juga lebih berhati-hati dalam berhutang. Pendamping menemukan tidak sedikit KPM yang terlilit hutang baik

dengan rentenir maupun dengan Bank keliling. Setelah diberikan pengarahan dalam P2K2, KPM mulai mampu mengatur keuangan dan mulai mempertimbangan sebelum memutuskan untuk meminjam, hal ini disebabkan KPM sudah mulai sadar dampak berhutang.

Untuk mengatasi risiko meminjam lagi, mengarahkan KPM untuk merencanakan menabung secara rutin serta disiplin baik setiap bulan maupun setiap minggu tergantung tipe yang dipilih oleh KPM. Selah adanya pengarahan melalui P2K2, KPM mulai mempraktikkan untuk menabung secara rutin baik di sekolah-sekolah maupun lembaga keuangan mikro seperti BMT.

Saat ini, tidak sedikit KPM yang mulai untuk mendirikan usaha kecil-kecilan seperti jual makanan ringan di lingkungan sekolah, jual sayur, jual kue, dan beberapa KPM mulai bekerjasama dengan KPM lainnya dan diarahkan oleh pendamping untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan mendirikan usaha warung kelontong. Seperti halnya penjelasan Informan 3 (CWP_3) sebagai berikut:

“lebih tertata dalam menggunakan keuangan, KPM mempraktekkan sistem amplop, berhati2 dalam berhutang, rencana menabung, serta membuat usaha.”

Hambatan yang dialami untuk mempraktikkan modul pengelolaan keuangan adalah keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh KPM, sehingga sulit bagi KPM untuk mengatur pengeluaran karena pendapatan yang sangat sedikit namun kebutuhan keluarga banyak. Selain itu, masih ada beberapa KPM yang terjerat hutang dengan rentenir yang menyebabkan pendapatan selalu habis untuk membayar hutang.

4) Modul Perlindungan Anak

Perubahan nyata pada modul perlindungan anak belum dilaksanakan secara maksimal. Informan 3 (CWP_3) menyebutkan bahwa masih banyak terjadi kasus bullying yang dialami anak-anak terutama di

sekolah-sekolah. Selain itu, Informan 2 (CWP_2) menyampaikan bahwa untuk kalangan KPM PKH terkait pendidikan sex sejak dini masih dinilai tabu, sehingga materi yang disampaikan oleh pendamping terkait *body mapping* tidak maksimal karena kesadaran KPM masih rendah.

Di samping itu, adanya faktor eksternal seperti *Handphone* yang mempengaruhi perilaku anak, hal tersebut dikarenakan masih banyak KPM yang belum mengerti penggunaan HP sehingga tidak bisa mengontrol apa yang dilihat oleh anak.

5) Modul Kesejahteraan Sosial

Tindakan nyata yang dilakukan oleh KPM dalam mempraktikkan modul kesejahteraan sosial seperti KPM yang memiliki komponen lansia mulai memahami cara mengurus kesehatan orang tua yang baik dari sebelumnya, serta tidak membentak apabila melakukan kesalahan. Seperti halnya penjelasan dari Informan 2 (CWP_2) sebagai berikut:

“anak mulai peduli kesehatan orang tua, tidak dibentak lagi, pokoke olehe ngopeni wong tuwo luwih apik teko sakdurunge pak.”

Hambatan dalam melaksanakan modul kesejahteraan sosial adalah banyak orang tua yang tidak mau untuk dirawat dengan menggunakan metode yang benar.

f. Graduasi PKM PKH di Kabupaten Tuban

Tingkat keberhasilan PKH dilihat dari adanya peningkatan taraf hidup KPM serta kesejahteraan sosial yang menjadi landasan dalam pelaksanaan graduasi. Saat ini, PKH tidak hanya fokus agar bantuan tepat sasaran, namun fokus utama PKH adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui proses graduasi. Dalam proses graduasi, hal terpenting adalah KPM PKH bisa berdaya dan tidak hanya memenuhi syarat kepesertaan PKH saja.

Pada tahun 2023 di kabupaten Tuban terdapat KPM PKH yang graduasi sebanyak 1.077 dari 39.415 KPM. Sedangkan target graduasi adalah 10% sehingga jumlahnya adalah 3.941.

Jumlah KPM yang graduasi dibagi ke dalam dua klasifikasi yaitu sebanyak 147 KPM diklasifikasikan sebagai Graduasi Mandiri Sejahtera (GMS), dan sebanyak 930 KPM yang diklasifikasikan sebagai Graduasi Alami (GA).

Angka 147 KPM yang graduasi mandiri sejahtera memiliki arti bahwa KPM digolongkan sebagai KPM yang berdaya dan memiliki penghasilan yang lebih, serta telah sejahtera. Sedangkan pada angka 930 KPM yang digolongkan sebagai klasifikasi Graduasi Alami yang memiliki arti bahwa KPM tidak memiliki komponen sebagai syarat kepesertaan PKH.

Tabel 4. 12 Tabel Data KPM PKH yang Graduasi Kabupaten Tuban Tahun 2023

| No | Kecamatan | Jumlah | | |
|----|------------|-------------------|-------|--------|
| | | Mandiri Sejahtera | Alami | Jumlah |
| 1 | Bancar | 20 | 95 | 115 |
| 2 | Bangilan | 10 | 89 | 99 |
| 3 | Grabagan | 4 | 29 | 33 |
| 4 | Jatirogo | 8 | 37 | 45 |
| 5 | Jenu | 2 | 13 | 15 |
| 6 | Kenduruan | 2 | 59 | 61 |
| 7 | Kerek | 1 | 33 | 34 |
| 8 | Merakurak | 48 | 59 | 107 |
| 9 | Montong | 1 | 10 | 11 |
| 10 | Palang | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Parengan | 7 | 9 | 16 |
| 12 | Plumpang | 9 | 61 | 70 |
| 13 | Rengel | 2 | 126 | 128 |
| 14 | Semanding | 7 | 35 | 42 |
| 15 | Senori | 6 | 45 | 51 |
| 16 | Singgahan | 15 | 69 | 84 |
| 17 | Soko | 1 | 26 | 27 |
| 18 | Tambakboyo | 1 | 45 | 46 |
| 19 | Tuban | 1 | 34 | 35 |
| 20 | Widang | 5 | 51 | 56 |

Sumber : Rekapitulasi graduasi kabupaten tuban periode januari-desember 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah dampingan di kecamatan Bancar terdapat KPM Graduasi Mandiri Sejahtera (GMS) sebanyak 20 KPM dan sebanyak 95 KPM Graduasi Alami, sehingga jumlah total KPM yang graduasi periode januari-desember 2023 di kecamatan Bancar sebanyak 115 KPM.

Sementara untuk kecamatan Jatirogo, sebanyak 4 KPM mengalami graduasi mandiri sejahtera, dan sebanyak 41 mengalami graduasi alami. Sehingga jumlah KPM di kecamatan jatirogo yang graduasi adalah sebanyak 45 KPM

Untuk kecamatan Senori, terdapat 6 KPM yang di graduasi mandiri sejahtera, sementara 45 KPM mengalami graduasi alami. Sehingga jumlah KPM di kecamatan senori yang di graduasi pada periode ini adalah sebanyak 51 KPM.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi P2K2

P2K2 merupakan salah satu program peningkatan kapasitas SDM KPM PKH, sehingga dalam pelaksanaannya telah ditentukan bagaimana proses implementasinya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keberhasilan implementasi P2K2 adalah pendekatan *top down*, karena pendekatan ini berkaitan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

Standar pelaksanaan program P2K2 telah ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai acuan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan P2K2 di lapangan. Oleh sebab itu, Peneliti berpedoman pada dimensi kepatuhan yang ditetapkan oleh *Ripley* dan *Franklin* terhadap pelaksanaan P2K2 yang ada di kabupaten Tuban. Sementara untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksana terhadap standar pelaksanaan yang telah ditetapkan, peneliti menggunakan tiga variabel model Meter dan Horn yakni sumber daya, sasaran dan standar kebijakan, serta komunikasi.¹⁰

Berdasarkan hasil temuan terkait implentasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga di kabupaten Tuban, diperoleh informasi bahwa standar pelaksanaan pembelajaran P2K2 di kabupaten Tuban yang digunakan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan P2K2 yang dibuat oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan

¹⁰ Kadji.

Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, peneliti menganalisis tingkat kepatuhan pelaksanaan P2K2 menggunakan standar yang digunakan, karena tingkat kepatuhan pelaksana dalam menjalankan Petunjuk Pelaksanaan P2K2 menjadi kunci dari keberhasilan program yang dijalankan.

Hasil analisis pada implementasi P2K2 di Kabupaten Tuban mengacu pada model implementasi kebijakan Meter dan Horn dengan mengambil tiga indikator yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan P2K2. Hasil pembahasan analisis diperoleh bahwa:

a. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses implementasi terbagi menjadi dua yakni manusia dan non manusia. Hasil analisis terhadap temuan penelitian diperoleh bahwa:

1) Manusia

Variabel manusia dalam proses pembelajaran P2K2 mencakup dua hal inti yakni pelaksana dalam hal ini adalah pendamping PKH, serta KPM PKH selaku pihak yang mendapatkan pembelajaran.

Ketentuan pendamping dalam pelaksanaan P2K2 sesuai Petunjuk Pelaksanaan yang digunakan yakni pendamping diwajibkan sudah mendapatkan minimal salah satu program pembekalan.¹¹ Terdapat dua program pembekalan P2K2 untuk pendamping PKH yakni diklat P2K2 yang diadakan oleh Balai Diklat, serta program *coaching* P2K2 yang dilakukan oleh baik koordinator wilayah, koordinator kabupaten maupun pendamping yang telah mendapatkan pembekalan P2K2 di Balai Diklat.

Hasil temuan menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban, pendamping telah memperoleh pembekalan P2K2 yang diadakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial RI. Terdapat perbedaan waktu pemanggilan untuk mendapatkan pembekalan P2K2, hal ini menyebabkan awal pelaksanaan pembelajaran P2K2 di tiap wilayah di Kabupaten Tuban mengalami perbedaan. Sehingga, hasil analisis terhadap ketentuan pendamping PKH di Tuban telah optimal dilaksanakan.

¹¹ Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia.

Selain pendamping, pihak yang menjadi bagian penting pada pelaksanaan P2K2 adalah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Pada proses pembelajaran P2K2, KPM menjadi objek penerima manfaat pembelajaran dengan tujuan agar terwujudnya perubahan perilaku KPM menjadi lebih mandiri setelah diberikan pembelajaran.

Pada buku petunjuk teknis P2K2, ketentuan penerima manfaat pembelajaran P2K2 adalah pihak yang ditetapkan sebagai KPM PKH. Selain itu, terdapat ketentuan jumlah maksimal dalam pembelajaran yakni 40 orang KPM.¹²

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran P2K2 di kabupaten Tuban telah dijalankan sesuai ketentuan jumlah KPM di dalam Petunjuk Pelaksanaan P2K2. Sesuai informasi data yang diperoleh pada penelitian didapatkan bahwa dari ketiga lokasi penelitian tidak ada yang lebih dari 40 KPM per kelompok dalam setiap proses pembelajaran P2K2.

2) Non Manusia

Di samping sumber daya manusia, dalam model implementasi Meter dan Horn terdapat sumber daya lainnya yaitu non manusia yang salah satunya berupa sarana dan prasarana. Ketersediaan sumber daya yang baik berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi suatu program.

Hasil temuan menunjukkan bahwa prasarana atau peralatan yang dibutuhkan menurut standar yang ditetapkan pada petunjuk teknis P2K2 berupa Modul, Brosur, Poster, Flipchart, Buku Pintar, film, dan kartu.¹³ Pada pelaksanaan P2K2, peneliti menemukan bahwa peralatan yang dimiliki oleh pendamping berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan peralatan setiap pendamping tergantung pada tahun pemanggilan pembekalan. Dalam proses observasi di lapangan masih banyak kekurangan alat sehingga ada beberapa pendamping yang membuat

¹² Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia.

¹³ Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia.

peralatan sendiri dengan cara membuat flipchart menggunakan kertas plano dan lain-lain.

Dalam analisis terhadap hasil temuan prasarana P2K2 di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa prasarana masih belum optimal.

Berikut adalah tabel yang digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan standar yang telah ditetapkan dalam implementasi sumber daya pada pelaksanaan P2K2.

Tabel 5. 1 Hasil Temuan Indikator Sumber Daya

| Standar Pelaksanaan | Hasil Temuan | Kesimpulan |
|--|--|------------------------------|
| Pendamping sudah mendapatkan minimal salah satu program pembekalan yaitu program pembekalan P2K2 oleh bagai diklat, serta program <i>coaching</i> P2K2 yang dilakukan oleh baik Korwin/Korkab/ kabupaten maupun pendamping yang telah mendapatkan pembekalan P2K2 di balai diklat. | Pendamping di Tuban telah mengikuti diklat pembekalan P2K2 | Sudah optimal sesuai standar |
| Pada proses pembelajaran P2K2, jumlah KPM yang memikuti maksimal 40 orang | Dalam setiap pelaksanaan P2K2, KPM yang mengikuti rata-rata di bawah 30 peserta per kelompok | Sudah optimal sesuai standar |
| Prasarana yang dibuthkan dalam pembelajaran berupa | Peralatan belum lengkap sehingga | Belum optimal |

| | | |
|--|---|----------------|
| Brosur, Poster, Flipchart, Buku Pintar, film, kartu, dan modul | beberapa pendamping membuat media pembelajaran sendiri dengan alat seadanya | sesuai standar |
|--|---|----------------|

b. Sasaran dan Standar Kebijakan

P2K2 merupakan program yang dijalankan dalam PKH yang memiliki tujuan untuk percepatan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Sebagai bagian dari PKH, standar kebijakan pelaksanaan P2K2 di Tuban mengacu pada kebijakan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia UU No 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial.

Dalam menjalankan P2K2, pelaksana mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga dalam mengukur ketercapaian pelaksanaan P2K2, Peneliti mengacu pada standar yang sudah ada. Berikut hasil analisis kepatuhan pelaksanaan pada standar kebijakan P2K2. Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan P2K2, di antaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan P2K2 menurut petunjuk teknis P2K2 yaitu pertama pendamping PKH membuat rancangan pelaksanaan P2K2 sesuai dengan pembagian wilayah dampingan masing-masing. Pendamping bersama dengan KPM membuat rencana jadwal serta lokasi pelaksanaan P2K2 secara bersama-sama. Hasil kesepakatan nantinya dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan P2K2 sebagai acuan pendamping.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa pendamping menyusun rencana pelaksanaan P2K2 yang dilakukan setiap awal bulan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pendamping untuk menyusun kegiatan bulanan. Susunan rencana P2K2 terdiri dari penentuan jadwal P2K2 dalam satu bulan, modul yang akan disampaikan, serta pemilihan lokasi diadakannya P2K2. Lokasi menjadi bagian yang sangat penting karena jarak antar rumah KPM satu dengan yang lain jauh. Sehingga penentuan lokasi harus dilakukan

secara bersama-sama dengan KPM untuk menghindari konflik serta agar semua KPM bisa mengikuti P2K2.

Analisis terhadap temuan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pelaksanaan P2K2 telah berjalan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ada dalam petunjuk teknis P2K2.

2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap pelaksanaan ini tidak ada di dalam petunjuk teknis P2K2, namun diatur dalam setiap modul P2K2 pada bagian susunan kegiatan serta disampaikan dalam diklat yang diikuti oleh pendamping. Tahap proses pembelajaran diawali dengan pembukaan yang berisi pemberian informasi awal serta permainan yang berhubungan dengan materi yang akan dijelaskan. Setelah dilakukan pembukaan, kegiatan selanjutnya adalah proses penyampaian materi yang terdiri dari lima modul yaitu kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Pada tahap akhir dilakukan penutup.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran P2K2 di kabupaten Tuban dimulai dengan pembukaan. Pada sesi pembukaan, pendamping selaku fasilitator membuka sesi pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar KPM selama satu bulan terakhir.

Setelah pendamping membuka sesi, pendamping mengajak KPM untuk bermain bersama dalam bentuk *ice breaking* agar KPM lebih berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah pendamping menanyakan masalah yang dialami KPM serta menanyakan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya.

Tahap selanjutnya, pendamping menyampaikan materi menggunakan tiga metode yakni metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab dengan KPM. Dalam penyampaian materi, pendamping menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh

KPM agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh KPM.

Setelah semua tahap dilaksanakan, tahap terakhir adalah penutup. Pada tahap ini, pendamping menutup sesi dengan cara mengingatkan kembali slogan yang telah diajarkan pada setiap sesi. Sebelum kegiatan berakhir, pendamping memberikan motivasi agar KPM lebih mandiri dan tidak tergantung terhadap bantuan yang diterima.

Ditemukan beberapa hambatan yang dialami selama proses pembelajaran. Hambatan tersebut berupa ketidakhadiran beberapa KPM dikarenakan jarak antar rumah KPM relatif jauh sehingga ketika cuaca sedang hujan banyak yang tidak bisa hadir, meskipun pada tahap pemilihan lokasi sudah disepekat lokasi yang paling mudah aksesnya. Selain ketidakhadiran hambatan yang ditemukan berupa latar belakang pekerjaan KPM yang berbeda. Seperti hasil temuan di daerah bancar, mata pencaharian KPM memiliki beberapa perbedaan yakni perdagangan, pertanian, serta nelayan. Dari perbedaan pekerjaan, hambatan yang ditimbulkan adalah ketika musim panen, KPM yang bekerja sebagai petani akan sulit untuk hadir.

Hasil analisis terhadap temuan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan, poses pembelajaran telah dijalankan secara optimal sesuai petunjuk pelaksanaan P2K2. Meskipun demikian, hambatan yang dialami bukan semata-mata menunjukkan bahwa program tidak berhasil di implementasikan. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh *Ripley* dan *Franklin* yakni kekurangan yang terjadi pada dimensi kepatuhan adalah adanya kesalahan dalam desain program. Sehingga terkadang kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori yang telah ditetapkan.

Dari kendala yang dihadapi, peneliti menilai bahwa hal tersebut tidak menghalangi program mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena sesuai hasil penelitian, pendamping masih bisa mengatasi kendala yang terjadi melalui strategi-strategi yang dilakukan oleh pendamping.

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan instrumen monitoring terhadap pelaksanaan P2K2 yang telah dilaksanakan. Sesuai petunjuk teknis P2K2, pencatatan dan pelaporan merupakan instrumen penilaian pendamping. Pelaporan P2K2 dilakukan setiap bulan dan secara berjenjang yaitu dimulai dari pendamping PKH, Koordinator Kabupaten, hingga Koordinator Wilayah. Kegiatan P2K2 yang dilaporkan mencakup jumlah kehadiran KPM yang mengikuti P2K2 dalam setiap sesi, jenis kegiatan, serta waktu pelaksanaan.

Hasil penelitian yang ditemukan mengemukakan bahwa pelaporan P2K2 di kabupaten Tuban dilakukan setiap bulan dalam laporan kegiatan. Pelaporan yang dilakukan mencakup waktu pelaksanaan kegiatan P2K2, Kelompok mana saja yang telah mengikuti kegiatan P2K2, Materi apa saja yang telah disampaikan, output setelah kegiatan P2K2, serta foto kegiatan P2K2.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan PKH kabupaten Tuban telah optimal dilaksanakan.

Berikut adalah tabel perbandingan pelaksanaan P2K2 antara SOP dalam P2K2 dengan hasil lapangan yang ditemukan selama penelitian berlangsung, yaitu:

Tabel 5. 2 Hasil Temuan Indikator Sasaran dan Standar Kebijakan

| Standar Pelaksanaan | Hasil Temuan | Kesimpulan |
|---|---|--------------------------|
| Pendamping membuat tabel perencanaan kegiatan P2K2 yang berisi jadwal, lokasi, materi yang akan di sampaikan setiap bulannya. | Pendamping menyusun rencana pelaksanaan P2K2 disetiap awal bulan. Susunan rencana P2K2 yang dibuat oleh pendamping PKH di kabupaten Tuban terdiri dari penentuan jadwal P2K2 dalam satu bulan, modul yang | Sudah optimal sesuai SOP |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| | akan disampaikan, serta pemilihan lokasi diadakannya P2K2 | |
| Proses pembelajaran diawali dengan pembukaan, proses pembelajaran dengan cara diskusi, ceramah, serta tanya jawab, dan diakhiri penutup | <ul style="list-style-type: none"> • Pendamping membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, serta mengajak <i>ice breaking</i> • Sebelum memulai sesi, pendamping mengidentifikasi masalah melalui tanya jawab dengan KPM, dan menanyakan materi yang sebelumnya diajarkan. Selanjutnya pendamping memulai proses pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi dengan KPM, dan tanya jawab terkait masalah yang dihadapi dan <i>review</i> materi • Pendamping menutup sesi dengan mengajak KPM untuk mengucapkan slogan sesi dan | Sudah optimal sesuai SOP |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| | memberikan motivasi | |
| Monitoring pelaksanaan P2K2 dilakukan setiap bulan yang dilakukan oleh pendamping, korbab, dan korwil. | Pendamping selalu melaporkan kegiatan setiap bulan. Bentuk monitoring yang dilakukan berupa pencatatan dan pelaporan yang meliputi jumlah kehadiran KPM, waktu pelaksanaan, materi, output, dan dokumentasi | Sudah optimal sesuai SOP |

c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Hasil temuan menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu strategi penguatan yang dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan P2K2 dapat terwujud. Dalam pelaksanaan P2K2, komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak karena pada dasarnya program keluarga harapan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. Sebagai upaya penguatan aktivitas, strategi komunikasi dilakukan ke dalam beberapa bentuk yakni 1) komunikasi informatif, merupakan komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh KPM, 2) komunikasi persuasif, merupakan bentuk komunikasi yang diberikan untuk memotivasi KPM dan mengajak agar KPM menjadi lebih mandiri, 3) komunikasi interpersonal, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk keperluan dengan berbagai macam pihak.

Dalam meningkatkan hubungan baik dengan pihak eksternal, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal. Hasil temuan menunjukkan bahwa PKH di kabupaten Tuban menjalankan komunikasi interpersonal untuk beberapa keperluan yaitu

- 1) Komunikasi interpersonal dilakukan dengan sesama pendamping, maupun dengan koordinator kecamatan dan kabupaten untuk mendiskusikan terkait permasalahan yang dialami masing-masing pendamping dengan harapan agar permasalahan yang

- dialami oleh masing-masing pendamping dapat diselesaikan melalui tukar pikiran dan pengalaman.
- 2) Komunikasi interpersonal dengan pemerintah desa dilakukan untuk sosialisai program, baik terkait PKH, P2K2, maupun program lainnya dalam lingkup PKH.
 - 3) Komunikasi dengan dinas koperasi dan perdagangan, berdasarkan tujuan dalam pelaksanaan P2K2 yakni adanya perubahan perilaku KPM agar menjadi lebih mandiri salah satunya dengan cara mendirikan usaha, maka melalui komunikasi ini diharapkan agar dapat berkoordinasi dalam mendirikan UMKM oleh KPM PKH
 - 4) Komunikasi interpersonal dengan dinas sosial terutama bidang pemberdayaan, adanya komunikasi ini diharapkan agar pihak terkait bisa memberikan *support* terutama kepada KPM yang telah dinilai mampu dan mandiri untuk mendapatkan pembekalan dalam hal pemberdayaan oleh pihak terkait.
 - 5) Komunikasi interpersonal dengan pihak kesehatan, hal ini dilakukan agar membantu dalam penyampaian materi P2K2 terkait kesehatan.

Hasil analisis pada indikator komunikasi dan penguatan aktivitas telah dilaksanakan oleh PKH di kabupaten Tuban. Sehingga pada proses komunikasi dapat dikatakan bahwa telah diimplementasikan dengan optimal.

2. Efektivitas P2K2 dalam Peningkatan Graduasi KPM PKH

Pada pembahasan ini, peneliti akan menganalisis tingkat efektivitas pembelajaran P2K2 yang telah dilaksanakan di kabupaten Tuban dalam upaya peningkatan Graduasi KPM PKH di kabupaten Tuban. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong perubahan perilaku SDM agar menjadi lebih mandiri. Program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) merupakan program peningkatan kualitas SDM KPM melalui pemberian stimulus berupa pembelajaran secara berkelanjutan kepada KPM. P2K2 yang memiliki tujuan agar adanya peningkatan pada pengetahuan dan kesadaran KPM terhadap pendidikan, kesehatan, pengasuhan, pengelolaan keuangan keluarga, pencegahan kekerasan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran KPM diharapkan di masa depan dapat mengubah perilaku KPM

menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap bantuan yang diterima, dengan demikian diharapkan rantai kemiskinan dapat diputus melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran KPM yang lebih baik bukan hanya pemberian bantuan sosial saja.

Hasil pembahasan terkait implementasi P2K2 di kabupaten Tuban yang dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran P2K2 di beberapa aspek telah berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini peneliti ingin menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan P2K2 yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan angka graduasi KPM PKH di wilayah kabupaten Tuban.

Teori efektivitas menurut subagyo menyebutkan bahwa efektivitas merupakan kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁴ Sehingga suatu program dikatakan efektif apabila tujuannya dapat terpenuhi. Untuk mengukur tingkat efektivitas program P2K2, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno yang terdiri dari 6 indikator, diantaranya:

1) Pemahaman Program

Pemahaman program P2K2 adalah bagaimana pemahaman pendamping dan KPM PKH terhadap program P2K2. Semakin pendamping dan KPM mengerti proses pelaksanaan dan tujuan program P2K2 maka semakin efektif program tersebut.

Hasil analisis temuan menunjukkan bahwa baik pendamping maupun KPM telah memahami bagaimana pelaksanaan P2K2 yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan menyampaikan materi-materi sesuai modul P2K2 yang dilakukan setiap bulan. Pendamping dan PKH memahami bahwa perubahan perilaku adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran P2K2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator pemahaman program dikategorikan efektif.

Adanya penambahan pemahaman menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui P2K2 mampu menambah

¹⁴ N W Budiani, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2.1 (2017), 49–57.

pengetahuan KPM PKH, karena melalui P2K2 masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang¹⁵

Tabel 5. 3 Hasil Temuan Indikator Pemahaman Program

| Pemahaman Program | Hasil Temuan | Kesimpulan |
|---|---|------------|
| Pendamping dan KPM PKH memahami bagaimana P2K2 dan tujuan yang ingin dicapai melalui P2K2 | Pendamping dan KPM PKH memahami bahwa P2K2 merupakan proses pembelajaran setiap bulan berupa penyampaian materi-materi sesuai modul P2K2 dan memiliki tujuan yakni perubahan perilaku KPM menjadi lebih mandiri | Efektif |

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa peran pendamping sangat besar dalam memberikan pemahaman kepada KPM PKH terutama terkait P2K2. Pada pelaksanaan P2K2 ini, pendamping dituntut untuk terampil dalam banyak hal. Dalam upaya meningkatkan pemahaman KPM, pendamping dituntut untuk terampil sebagai seorang pendidik untuk menyampaikan materi P2K2, selain itu pendamping juga harus memiliki keterampilan teknis untuk mengatur berjalannya kegiatan P2K2. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rahmawati yakni pendamping memiliki peran penting sebagai fasilitator, tenaga pendidik, representasi masyarakat, serta peran teknis yang mengharuskan pendamping untuk memiliki keterampilan dalam mengatur peran tersebut.¹⁶

¹⁵ Hasan and Muhammad.

¹⁶ Evi Rahmawati and Bagus Kisworo, 'Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1.2 (2017), 161–69 <<https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>>.

2) Tepat Sasaran

Sasaran dari program P2K2 adalah seluruh KPM PKH, sehingga program ini bersifat wajib. Hasil temuan menunjukkan bahwa sasaran pelaksanaan P2K2 di kabupaten Tuban adalah KPM PKH dengan ketentuan KPM PKH yang mengikuti program pembelajaran P2K2 adalah kepala keluarga atau yang mewakili.

Pembahasan terkait sasaran penerima program pembelajaran P2K2 di kabupaten Tuban dapat dikategorikan efektif. Meskipun demikian, ditemukan hambatan dalam proses pembelajaran seperti perbedaan jenjang pendidikan KPM. KPM PKH terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yakni dari lulusan SD hingga SMA, bahkan tidak sedikit ditemukan KPM yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Perbedaan tingkat pendidikan menjadi penghambat dalam penerimaan materi, sehingga pendamping dituntut agar memahami setiap KPM yang mengikuti P2K2 agar materi dapat dipahami. Disamping itu, perbedaan usia juga menjadi penghambat dalam proses pembelajaran karena banyak KPM yang usia lanjut mengalami kesusahan saat materi yang mengharuskan untuk menulis dan berhitung.

Sesuai dengan model Zhao dan Zhang yang menjadikan pendidikan sebagai variabel kontrol, karena perbedaan pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman.¹⁷

Hambatan lain yang ditemukan berupa perbedaan komponen. Dalam satu kelompok terdiri dari beraneka ragam KPM dengan komponen yang berbeda-beda. Hambatan ditemukan selama proses pembelajaran yaitu pada materi sesi kesehatan dan gizi ibu hamil namun ada KPM yang sudah lansia, sehingga materi tersebut tidak dibutuhkan oleh lansia. Meskipun demikian, untuk mengatasi hal seperti ini tidak mudah karena dalam satu kelompok terdiri dari KPM yang komponen berbeda-beda, jika dikelompokkan berdasarkan komponen maka membutuhkan waktu yang relatif banyak untuk melaksanakan P2K2, sedangkan pendamping memiliki tugas lain. Sehingga untuk mengatasi perbedaan komponen

¹⁷ Zhao and Zhang.

ini, pendamping perlu melakukan inovasi terutama pada saat pengajaran P2K2.

Hal demikian disampaikan oleh Yefni dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa kendala yang dialami pada proses pemberdayaan adalah perbedaan latarbelakang dan kriterianya sehingga masyarakat hanya sekedar tahu saja, tidak mampu menjawab permasalahan yang dialami.¹⁸

Berikut merupakan tabel perbandingan standar sasaran dengan hasil temuan dalam proses P2K2.

Tabel 5. 4 Hasil Temuan Indikator Tepat Sasaran

| Sasaran P2K2 | Hasil Temuan | Kesimpulan |
|-----------------|--|------------|
| seluruh KPM PKH | Peserta P2K2 adalah seluruh KPM PKH di wilayah kabupaten Tuban | Efektif |

3) Tepat Waktu

Pada teori efektivitas menurut Sutrisno disebutkan bahwa suatu program dikategorikan efektif jika sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam P2K2, waktu dikatergorikan menjadi 2 macam yakni waktu pelaksanaan dan durasi yang dihabiskan. Pada petunjuk teknis P2K2 disebutkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan P2K2 adalah 1 bulan sekali dengan durasi selama 120 menit (2 jam).

Hasil temuan menunjukkan adanya perbedaan dalam ketepatan waktu. Berikut merupakan perbedaan pelaksanaan diketiga lokasi penelitian.

Tabel 5. 5 Hasil Temuan Indikator Tepat Waktu

| Kecamatan | Waktu Pelaksanaan P2K2 | Durasi | Kesimpulan |
|-----------|--|-----------|-------------------------------|
| Jatirogo | Rutin 1 bulan sekali, namun tidak merata untuk seluruh wilayah dampingan | 120 menit | Belum efektif disemua wilayah |
| Bancar | Rutin 1 bulan sekali dan dilakukan oleh | 120 menit | Sudah efektif |

¹⁸ Yefni.

| | | | |
|--------|--|-----------|---------------|
| | semua wilayah dampingan | | |
| Senori | Ada yang rutin, ada yang 3 bulan sekali, namun sekarang beberapa dampingan hanya pertemuan kelompok saja | 120 menit | Belum efektif |

Hasil analisis data tentang ketepatan waktu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada lokasi dengan hasil efektif menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut memiliki komitmen dalam pelaksanaan P2K2. Meskipun demikian bukan berarti lokasi lainnya tidak memiliki komitmen, waktu pelaksanaan yang tidak efektif disebabkan oleh beberapa kendala yaitu pendamping harus mengerjakan tugas lainnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Agustri dkk yaitu salah satu hambatan pelaksanaan P2K2 adalah banyaknya tugas dan tanggung jawab pendamping PKH selain P2K2 sehingga jadwal P2K2 menjadi terhambat.¹⁹

Kendala lain yang menghambat waktu pelaksanaan adalah terjadi *rolling* wilayah dampingan. Wilayah dampingan baru yang mengharuskan pendamping beradaptasi dari awal, karena ditemukan bahwa dampingan baru belum pernah melaksanakan P2K2, atau sudah berjalan namun belum jelas sampai dimana materi yang disampaikan oleh pendamping sebelumnya.²⁰

4) Tercapainya tujuan

Suatu program dikatakan efektif apabila dapat memberikan manfaat. Program P2K2 memiliki tujuan dapat mengubah perilaku KPM melalui peningkatan kualitas

¹⁹ Tutik Agustri, M Abdul Adib, and Achmad Sarbanum, 'Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dalam Perubahan Prilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pkh Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung', *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 01.03 (2022), 943–52 <<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>>.

²⁰ Rahmawati and Kisworo.

SDM. P2K2 merupakan program yang dirancang untuk memberikan stimulus melalui kegiatan pembelajaran agar kualitas SDM meningkat. Hasil temuan menunjukkan bahwa pola pikir KPM yang masih menggunakan pola pikir lama sulit untuk diubah. Sehingga tujuan adanya perubahan perilaku KPM masih sulit dan memerlukan waktu yang lama. KPM saat ini masih bergantung pada bantuan yang diterima, perlu adanya dorongan dan motivasi agar pola pikir KPM berubah.

Berikut merupakan tabel indikator tercapainya tujuan P2K2 di kabupaten Tuban yaitu:

Tabel 5. 6 Hasil Temuan Indikator Tercapainya Tujuan

| Tujuan P2K2 | Hasil Temuan | Kesimpulan |
|---|---|---------------|
| Merubah pola pikir dan perilaku KPM menjadi lebih mandiri | Pola pikir lama sulit untuk diubah, KPM masih bergantung pada bantuan yang diterima | Belum efektif |

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa P2K2 belum efektif dalam mengubah perilaku untuk menjadi mandiri, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan KPM yang masih bergantung pada bantuan yang diterima. Sehingga bantuan yang diberikan seharusnya untuk keperluan lain seperti pendidikan namun digunakan sebagai biaya hidup. Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa dkk yang menyebutkan bahwa FDS secara efektif mampu meningkatkan kemandirian jika dibandingkan dengan sebelum menerima P2K2, namun realita yang terjadi masih banyak ditemukan KPM PKH yang masih takut kehilangan bantuan PKH.²¹

5) Perubahan Nyata

Suatu program dikategorikan efektif apabila dapat memberikan dampak secara langsung terhadap sasaran program. Sehingga program P2K2 dikatakan efektif apabila terdapat perubahan nyata yang dialami oleh KPM.

Hasil temuan menunjukkan ada beberapa perubahan nyata yang terjadi pada KPM setelah diberikan pembelajaran P2K2 ditinjau dari modul yang telah diajarkan.

²¹ Annisa, Kamal, and Alkhendra.

Pada modul kesehatan dan gizi, terjadi beberapa perubahan yaitu 1) KPM yang hamil dulu memeriksakan kandungan hanya ketika sakit saja namun sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya memeriksakan kandungan secara rutin selama dan sesudah masa kehamilan. 2) KPM mulai menyadari pentingnya menjaga gizi dengan cara menjaga pola konsumsi dengan baik. KPM mulai mempraktikkan mengolah masakan namun gizinya tetap terjaga, selain itu KPM juga bisa mengolah makanan yang sehat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPM. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPM yaitu bahan makanan yang bergizi relatif mahal, sehingga hal ini menjadi tantangan bagaimana KPM mampu mengolah makanan bergizi sesuai *budget* yang dimiliki. Selain itu, rumah KPM relatif kecil sehingga banyak ditemukan jarak antara kamar mandi dengan ruang makan terlalu dekat yang mempengaruhi gizi. Perubahan menjadi lebih baik merupakan indikasi bahwa program telah dijalankan dengan baik, namun terkadang dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Sehingga pada modul ini dikategorikan sebagai efektif namun belum sepenuhnya.

Perubahan nyata yang ditemukan sesuai modul pendidikan dan pengasuhan yakni 1) KPM mulai sadar akan pentingnya pendidikan sehingga KPM mulai menyekolahkan anaknya sejak PAUD hingga SMA bahkan banyak anak KPM yang mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi. 2) KPM mulai sadar akan pentingnya pola pengasuhan yang benar, hal ini dapat dilihat dari KPM yang mulai menjaga cara bicara dan tidak membentak maupun melakukan tindakan kekerasan kepada anak jika anak melakukan kesalahan. Hambatan yang ditemui adalah masih banyak KPM yang menggunakan pola asuh jaman dulu sehingga masih mementingkan budaya patriarki yaitu yakni hanya ibu/perempuan yang memiliki kewajiban mendidik anak. Kesadaran pada KPM akan pendidikan mencerminkan bahwa KPM mulai meningkatkan pengetahuannya dan mulai mempraktikkan, namun beberapa kendala yang terjadi dapat diartikan bahwa perubahan pada modul ini dikatakan efektif namun belum sepenuhnya.

Pada Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha mengalami beberapa perubahan nyata yang terjadi diantaranya 1) KPM mulai memahami dan bijak

dalam menggunakan keuangan yang dimiliki, hal ini terlihat dari KPM yang mulai mempraktikkan menggunakan keuangan sesuai prioritas dan lebih tertata. 2) KPM mulai berhati-hati saat ini meminjam uang, jika sebelumnya banyak KPM yang terlilit hutang, saat ini mulai lebih berhati-hati lagi jika ingin berhutang. 3) KPM mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan, saat ini KPM sudah bisa menggunakan sistem amplop untuk mengelompokkan ke dalam amplop pengeluaran keuangan sesuai kebutuhan. 3) KPM sudah menyadari pentingnya menabung, saat ini banyak KPM yang mulai menabung secara rutin ke lembaga-lembaga yang terpercaya. 4) KPM memulai untuk membuka usaha kecil-kecilan, ada yang berjualan sayur, makanan ringan, bahkan sudah mampu mendirikan KUBE yang didampingi oleh pendamping. Meskipun demikian, perubahan belum dirasakan oleh semua KPM, hal ini dapat dilihat yaitu masih ditemukan KPM yang mengalami terlilit hutang karena keuangan yang terbatas. Oleh sebab itu, walaupun sudah banyak perubahan yang terjadi terutama pada tingkat pengetahuan KPM namun pada tingkat keterampilan masih belum sepenuhnya efektif.

Perubahan nyata yang terjadi pada modul perlingungan anak masih belum optimal jika dibandingkan dengan perubahan nyata modul lainnya. Saat ini masih ditemukan kasus bullying di sekolah. Selain itu, banyak KPM menganggap bahwa pendidikan sex sejak dini merupakan suatu hal yang tabu. Hambatan yang terjadi adalah perilaku *bullying* yang dilakukan anak-anak banyak ditemukan melalui faktor eksternal seperti *handphone*, sementara banyak KPM yang berlatar belakang pendidikan rendah sehingga tidak sedikit yang bisa mengoperasikan *handphone*. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan nyata pada modul ini belum efektif.

Modul yang kelima adalah modul kesejahteraan sosial. Perubahan nyata yang terjadi adalah KPM sudah mulai menyadari cara mengurus orang tua yang benar dan tidak membentak, namun masih ditemukan hambatan yakni orang tua yang tidak mau diurus oleh anaknya dengan bebeapa alasan seperti tidak akur dan lain-lain. Sehingga pada modul ini dikategorikan belum efektif sepenuhnya.

Berikut tabel perubahan nyata yang dialami KPM setelah diberikan pembelajaran P2K2. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Temuan Indikator Perubahan Nyata

| Modul P2K2 | Perubahan | Hambatan | Kesimpulan |
|--------------------|--|--|-------------------|
| Kesehatan dan Gizi | <ul style="list-style-type: none"> ● Mulai memeriksakan kandungan ke posyandu secara rutin selama dan sesudah kehamilan. ● Kesadaran KPM terhadap pentingnya menjaga gizi melalui pola konsumsi yang benar. ● KPM sudah mampu mempraktekkan bagaimana cara memasak masakan yang sehat agar gizi pada masakan tetap terjaga. ● KPM juga sudah mampu mengolah masakan sehat dengan bahan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan KPM. | Bahan makan yang bergizi mahal Jarak antara kamar mandi dan ruang makan terlalu dekat karena kondisi rumah yang kecil | Efektif, |
| Pendidikan dan | <ul style="list-style-type: none"> ● Menjaga cara bicara untuk tidak | <ul style="list-style-type: none"> ● Masih menggunakan pola | Efektif |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| Pengasuhan Anak | membentak dan tidak melakukan kekerasan kepada anak <ul style="list-style-type: none"> ● Mulai menyekolahkan anaknya dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga ke tingkat SMA | pengasuhan zaman dulu <ul style="list-style-type: none"> ● Budaya patriarki yakni hanya ibu /perempuan yang memiliki kewajiban mendidik anak | |
| Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan keuangan menjadi lebih tertata sesuai prioritas ● Berhati-hati dalam meminjam uang ● Menggunakan sistem amplop ● Menabung secara rutin ● Memulai usaha kecil-kecilan, dan mendirikan KUBE | <ul style="list-style-type: none"> ● Keterbatasan keuangan ● KPM terlilit hutang | Efektif |
| Perlindungan Anak | Belum maksimal, masih ada kasus bullying dan pendidikan sex sejak dini masih dianggap tabu | Belum memahami pentingnya perlindungan anak dan adanya faktor eksternal | Belum efektif |
| Kesejahteraan Sosial | Sudah memahami cara mengurus orang tua dan tidak membentak | banyak orang tua yang tidak mau untuk dirawat oleh anaknya | Efektif, namun belum sepenuhnya |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| | | karena banyaknya gesekan | |
|--|--|--------------------------|--|

Pembahasan terkait hasil analisis efektivitas pada indikator perubahan nyata adalah pada komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi menunjukkan hasil yang efektif, namun pada komponen yang lain hasilnya belum efektif. Sesuai penelitian sebelumnya, Tutik dkk menyebutkan bahwa kegiatan P2K2 berhasil meningkatkan pengetahuan KPM dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi.²²

Iis dkk menyampaikan bahwa adanya P2K2 dapat meningkatkan keterampilan hidup KPM PKH seperti keterampilan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, seta ekonomi.²³

Hasil pengukuran menggunakan indikator lima sutrisno menunjukkan bahwa sebagian indikator masuk dalam kategori efektif namun sebagian yang lain termasuk belum efektif.

Meskipun demikian, tujuan utama adanya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan kemandirian KPM yang dilihat dari tingkat kesejahteraan yang meningkat yang ditandai dengan peningkatan angka graduasi mandiri sejahtera. Graduasi mandiri sejahtera menjadi indikator kemandirian karena KPM yang dikategorikan sebaga graduasi mandiri sejahtera adalah KPM yang secara sukarela keluar dari program PKH karena sudah merasa mampu dan mandiri secara finansial. Kesadaran diri akan kemampuan KPM mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan KPM dalam mengelola keluarga yang dibuktikan dengan perilaku sadar akan kemampuan yang dimiliki dan tidak tergantung dengan bantuan lagi.

Berikut adalah perbanding data graduasi mandiri sejahtera di dilokasi penelitian pada tahun 2023 dengan jumlah pelaksanaan.

²² Agusriani, Adib, and Sarbanum.

²³ Arfiyani, Raharjo, and Yusuf.

Tabel 5. 8 Hasil Temuan Perbandingan Graduasi

| Lokasi | Jumlah KPM | Jumlah KPM Graduasi Mandiri Sejahtera | Persentase | Pelaksanaan P2K2 |
|----------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| Bancar | 2651 | 20 | 0,8% | 1 bulan sekali |
| Jatirogo | 1337 | 8 | 0,6% | 1 bulan sekali namun tidak merata ke seluruh wilayah |
| Senori | 2165 | 6 | 0,3% | Tidak tentu, ada yang 1 bulan namun ada juga yang 3 bulan sekali |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lokasi dengan pelaksanaan P2K2 rutin memperoleh persentase dan jumlah graduasi paling banyak sebesar 0,8%, sedangkan lokasi dengan pelaksanaan P2K2 tidak tentu memperoleh persentase 0,3%. Hasil yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa adanya program P2K2 meningkatkan graduasi mandiri sejahtera di kabupaten Tuban. Semakin rutin P2K2 dilaksanakan maka semakin meningkat kualitas SDM PKH yang mampu mendorong menjadi SDM yang mandiri. Sesuai pemaparan dari Besse pada hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan P2K2 PKH berpengaruh terhadap peningkatan graduasi.²⁴

Meskipun demikian, hasil persentasi yang masih kecil mengindikasikan bahwa perubahan perilaku tidak mudah untuk diubah dan memerlukan waktu. Sesuai dengan model Haidong Zhao dan Lini Zhang menunjukkan bahwa sosialisasi keuangan berpengaruh secara langsung terhadap literasi keuangan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku dan kesejahteraan keuangan melainkan melalui variabel moderasi.²⁵ Dari pertanyaan di atas membuktikan bahwa perubahan perilaku dan kesejahteraan tidak bisa langsung berdampak, karena membutuhkan waktu yang lama.

²⁴ Wediawati and others.

²⁵ Zhao and Zhang.

Namun jika dilihat dari jumlah target Graduasi KPM PKH Kabupaten Tuban yang mencapai 3.941 maka hasil graduasi yang mencapai 1.077 belum mencapai target yang telah ditentukan. Sebagaimana konsep efektivitas Subagyo yakni efektivitas terjadi karena output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.²⁶

Berikut tabel efektivitas pelaksanaan P2K2 terhadap peningkatan angka Graduasi KPM di kabupaten Tuban, diantaranya adalah:

Tabel 5. 9 Hasil Temuan Efektivitas P2k2 dalam Peningkatan Graduasi

| Tepat Tujuan | Hasil temuan | Kesimpulan |
|---|--|-------------------|
| Tujuan P2K2 adalah perubahan perilaku menjadi mandiri | Daerah yang melaksanakan P2K2 dengan rutin menunjukkan hasil graduasi yang lebih tinggi dari daerah yang tidak rutin melaksanakan P2K2 | Belum Efektif, |

Beberapa hambatan ditemui oleh pendamping selama proses pembelajaran P2K2 menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping telah menjalankan strategi-strategi agar program tetap bisa dijalankan meskipun menghadapi beberapa hambatan agar tujuan P2K2 tetap bisa tercapai. Strategi yang dilakukan oleh pendamping PKH kabupaten Tuban adalah strategi inovasi untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana, strategi penguatan untuk memotivasi KPM dan strategi komunikasi untuk proses penyampaian materi.

Sesuai hasil penelitian Sukei yang menyebutkan bahwa inovasi pendamping memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan graduasi mandiri sejahtera.²⁷ Febrianto

²⁶ Budiani.

²⁷ Sukei, 'Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) Terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) Di Jawa Timur Analysis of the Effects of the Family Welfare Improvement Meeting (P2K2) on Graduation of Independent Prosperous (GSM) in East Ja', *Journal of Cakrawama*, September 2018, 2019, 1–10.

menyebutkan bahwa motivasi yang diberikan pendamping mempengaruhi perubahan perilaku KPM PKH²⁸



²⁸ Rendi Agung Febrianto, Utsman, and A. Rifai RC, 'Pengaruh Peran Pendamping Dan Motivasi Belajar Terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.1 (2020), 99 <<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24505>>.